

PENYELESAIN KONFLIK MASSAL YANG BERASPEK TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL (STUDI DI POLRES KUTAI KARTANEGARA)

TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2



Oleh:
Andre Anas
NIM: 126010103111001

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017

Persetujuan Tesis

Judul:

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PENUNTUTAN TIDAK DAPAT
DITERIMA DENGAN ALASAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK BISA
MENGHADIRKAN TERDAKWA**

Oleh:

CHALIS AL ROSSI

NIM: 126010103111013

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S
NIP. 19481230 197312 1 001

Dr. Nurini Aprilianda, SH., M.Hum
NIP. 19760429 200212 2 001

Mengetahui :

Ketua

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Istislam, S.H., M.Hum.
NIP. 19620823 198601 1 002

ABSTRAKSI

**Penyelesain Konflik Massal Yang Beraspek Tindak Pidana
Melalui Mediasi Penal
(Studi Di Polres Kutai Kartanegara)**

Oleh:
Andre Anas, S.IK

Penelitian yang berjudul "Penyelesain Konflik Massal Yang Beraspek Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal (Studi di Polres Kutai Kartanegara)". bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang konflik massal yang beraspek pidana yang terjadi antara PT. Rea Kaltim Plantation dan masyarakat sekitarnya dan untuk mengetahui dan menganalisis penyidik dalam menentukan sebuah model yang dipergunakan untuk menyelesaikan konflik massal yang beraspek pidana yang terjadi antara PT. Rea Kaltim Plantation dengan masyarakat sekitar.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis empiris, pendekatan yang dilakukan adalah yuridis sosiologis, lokasi penelitian dilakukan di Polres Kutai Kartanegara, jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan kemudian teknik analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa banyaknya hak-hak masyarakat adat yang dilanggar oleh PT. Rea Kaltim Plantation sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan serta tidak adanya kepastian dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara dalam menentukan sikap untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Rea Kaltim Plantation.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Tidak adanya pengakuan terhadap hak adat atas tanah dalam hukum yang ditunjukkan oleh beberapa anggota masyarakat sebagai akar penyebab disintegrasi sistem kepemilikan tanah bersama/komunal yang secara tradisi dijalankan, dan pemberian izin konsesi kepada perusahaan sektor swasta (kayu dan kelapa sawit) tanpa konsultasi dengan masyarakat yang telah memiliki, mendiami dan menggunakan tanah-tanah tersebut untuk sumber penghidupan mereka. Pemberlakuan hukum adat ini tidak serta merta menghilangkan fungsi komponen sistem peradilan pidana. Peran komponen sistem peradilan pidana yang terbesar adalah dari pihak kepolisian. Polisi sebagai jalur pertama dari sistem peradilan pidana, dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya dapat melakukan kerjasama dengan lembaga adat. Dalam penyelesaian sengketa dalam hukum adat, sistem peradilan pidana juga ikut andil di dalamnya. Sehingga fungsi sistem peradilan pidana adalah sebagai fungsi sosial dan fungsi kontrol di masyarakat.

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACTION

**Conflict Resolution Bulk Seeking Crime
Through Penal Mediation
(Study At Police Station Kutai Kartanegara)**

By:

Andre Anas, S.IK

The study, entitled "A Conflict Resolution of Bulk Seeking Criminal Acts Through Penal Mediation (Study at Kutai Kartanegara Resort Police)". Aims to identify and analyze the background of the mass conflict of criminal aspect that occurred between PT. Rea Kaltim Plantation and the surrounding community and to find out and analyze the investigators in determining a model used to resolve the mass conflict of criminal aspect that occurred between PT. Rea Kaltim Plantation with surrounding communities.

The method used in this research is using empirical juridical research, the approach taken is sociological juridical, the location of research conducted in Police Kutai Kartanegara, types and sources of data are primary data and secondary data, data collection techniques conducted by interviews, and then data analysis techniques Using qualitative juridical methods.

The results obtained that the number of indigenous rights violated by PT. Rea Kaltim Plantation resulting in a prolonged conflict and the lack of certainty from the local government of Kutai Kartanegara in determining the attitude to resolve the conflict between the community and PT. Rea Kaltim Plantation.

The conclusion of this study is that the absence of recognition of customary land rights in law is demonstrated by some members of the community as the root cause of the disintegration of traditional communal / communal ownership systems, and granting concessions to private sector companies (timber and oil palm) Without consultation with communities who already own, inhabit and use these lands for their livelihoods. The enactment of customary law does not necessarily eliminate the functional components of the criminal justice system. The role of the largest component of the criminal justice system is from the police. The police as the first line of the criminal justice system, with its discretionary authority, can work together with customary institutions. In the settlement of disputes in customary law, the criminal justice system also contributes to it. So the function of criminal justice system is as social function and control function in society.

Keywords: Dispute Settlement, Criminal Justice System

RIWAYAT HIDUP

Andre Anas, Lahir di Padang Tanggal 06 Juni 1979 merupakan anak pasangan dari Bapak Nasrul Rusli dan Ibu Irawati.

Mengawali jenjang pendidikan formal Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Muara Penjalinan Koto Tengah pada tahun 1983, menamatkan Sekolah Dasar di SD 17 Bungo Pasang Tabing pada tahun 1991 dan menamatkan sekolah menengah tingkat pertama pada tahun 1994 di SMP Negeri 13 Padang, selanjutnya menamatkan sekolah lanjutan tingkat atas di SMA Negeri 2 Padang pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 1997, melanjutkan ke Akademi Kepolisian Republik Indonesia



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister bidang hukum di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, 29 Nopember 2016

Yang menerangkan,

CHALIS AL ROSSI



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para shahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya penulisan Tesis dengan judul : "Penyelesaian Konflik Massal Yang Beraspek Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal (Studi Di Polres Kutai Kartanegara)".

Terdorong keinginan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di bidang Hukum Pidana khususnya mengenai Penyelesaian Konflik Massal Yang Beraspek Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal (Studi Di Polres Kutai Kartanegara) dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan terkait masalah tersebut.

Maka penulis ingin mengkaji lebih dalam secara yuridis ke dalam suatu karya ilmiah. Selain hal tersebut penulisan tesis ini juga merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum dan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS., selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

4. Dr. Prija Djatmika, S.H., MS, selaku pembimbing utama, atas segala bimbingan dan petunjuk yang diberikan selama proses penulisan tesis ini.
5. Dr. Ismail Navianto, SH., M.H., selaku pembimbing kedua, atas segala bimbingan dan petunjuk yang diberikan selama proses penulisan tesis ini.
6. Para Dosen Universitas Brawijaya dan Universitas Mulawarman yang telah memberikan motivasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kedua orang tua Bapak nasrul Rusli dan ibu Irawati atas dukungan dan motivasi serta doanya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kedua Mertua atas dukungan dan motivasi serta doanya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Isteri tercinta Aula Rismadona atas dukungan dan motivasi serta doanya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Anak-anak tercinta Davola Pangeran Aundreno, Ghailand Rakha Aundreno, Aleysa Zahira Aundreno dan M. Bariq Mahdi Kalaf Aundreno atas dukungan dan motivasi serta doanya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Angkatan VIII Universitas Brawijaya, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Tesis yang sederhana ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang Hukum Pidana. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan Tesis ini, maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan, melainkan semata-mata karena kekhilafan penulis. Oleh karena itu kepada seluruh pembaca mohon memaklumi dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun.

Samarinda, 11 Juli 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
ABSTRACT	iv
RIWAYAT HIDUP	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik	8
1. Teori Konflik	8
2. Teori Negara Hukum	14
3. Teori Kebijakan hukum Pidana	18
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Lokasi Penelitian	25

4. Jenis dan Sumber Data	25
5. Teknik Pengumpulan Data	26
6. Teknik Analisis Data	30
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Konsep Penyelesaian Konflik	33
2. Konsep Tindak Pidana	35
3. Konsep Mediasi Penal	38
4. Konsep Penegakan Hukum	43
BAB III PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	47
1. Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	47
2. Profil PT. Rea Kaltim Plantation	52
3. Wilayah Studi	55
4. Sejarah Penduduk dan Kepemilikan Tanah	58
B. Pembahasan	62
1. Latar Belakang Konflik Massal Yang Beraspek Pidana Yang Terjadi Antara PT. Rea Kaltim Plantation Dan Masyarakat Sekitarnya.....	62
2. Penyidik Dalam Menentukan Sebuah Model Yang Dipergunakan Untuk Menyelesaikan Konflik Massal Yang Beraspek Pidana Yang Terjadi Antara PT. Rea Kaltim Plantation Dengan Masyarakat sekitar	114
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan sebuah masyarakat didasarkan pada interaksi antar anggota masyarakat. Dalam interaksi tersebut berbagai kepentingan bertemu. Apabila antar kepentingan itu berjalan secara selaras, maka tidak akan terjadi konflik. Namun, apabila dalam interaksi berbagai kepentingan antar warga masyarakat tersebut terdapat kepentingan pihak lain yang dirugikan, maka akan terjadi konflik.¹ Nyaris tidak ada masyarakat tanpa konflik atau sengketa, baik dalam skala didalam keluarga, maupun dalam skala besar yang melibatkan banyak orang, masyarakat, bangsa atau Negara. Sengketa adalah fenomena yang tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perkembangan kehidupan umat manusia, sekalipun berbagai macam upaya telah dilakukan oleh umat manusia untuk mencegah dan menanggulangi konflik.

Langkah-langkah dan upaya penyelesain konflik selama ini, belum mampu mencari penyelesaian secara tuntas. Langkah berupa penegakan hukum, dengan memberikan hukum pidana penjara bagi pelaku tindak pidana selama ini belum dapat menuntaskan persoalan secara mendasar. Sehingga diperlukan upaya penyelesaian secara permanen dapat menyelesaikan konflik atau sengketa yang mungkin timbul. Sehubungan dengan hal ini, diperlukan pola penyelesaian sengketa yang dapat menjawab agar konflik tidak terjadi kembali.

¹ Thomas Santosa, 2012, *Teori-teori Kekerasan*, Liberty Press Yogyakarta, hlm 183.

Mekanisme penyelesaian sengketa atau konflik di masyarakat dikenal juga mekanisme penyelesaian perkara diluar pengadilan atau *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Perspektif ilmu hukum, terdapat studi alternative penyelesaian sengketa atau yang sering dikenal *alternative dispute resolution*. Di Indonesia dianggap menarik dan penting jika dikaitkan dengan pandangan kelompok elit politik bangsa Indonesia dan pemikiran sebagai alat pakar hukum yang ingin mengaktualisasikan berbagai institusi atau nilai nilai yang hidup dalam masyarakat hukum untuk menjawab persoalan kemasyarakatan masa kini. Musyawarah mencapai mufakat merupakan proses penyelesaian sengketa dan mengambil keputusan yang dianggap berakar pada berbagai masyarakat hukum adat.²

Kepastian hukum dan rasa keadilan yang diharapkan melalui lembaga peradilan saat ini sudah kurang dipercaya, karena yang lebih dipentingkan adalah "pencitraan", yaitu "kemenangan".³ ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*ordinary court*) melalui proses negoisasi, mediasi, dan arbitrase. Negoisasi dan mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa secara kompromi (kooperatif antar pihak) dengan tujuan pemecahan masalah bersama. Dalam arbitrase, proses penyelesaian sengketa disebut metode kompromi negoisasi bersaing dan terdapat pihak ketiga yang putusannya bersifat final.⁴

² Hadimulya, 1977, ***Mempertimbangkan ADR Kajari Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan***, Lembaga studi dan advokasi masyarakat (ELSAM), Jakarta, Hlm 13.

³ Media Handayani, 2003, ***Aku Membeli, Maka Aku Ada; Kritik Terhadap Konsumerisme Menurut Pandangan Baudrillard dan Marcuse***, Majalah Respon, Volume 8 Nomor 01, Juni 2003. Hlm 23.

⁴ Rachmad safa'at, 2011, ***Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Latar Belakang, Konsep, dan Implementasi***, Surya Pena Gemilang Malang, Hlm 84.

Keberadaan mediasi sebagai bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) bukanlah sesuatu yang asing, karena penyelesaian konflik itu merupakan bagian norma yang hidup, atau paling tidak pernah hidup dalam masyarakat. Kondisi saat ini dapat ditelusuri dari kenyataan bahwa kehidupan masyarakat berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan, yang intinya adalah bahwa semua orang merasa dihormati, dihargai, dan tidak ada yang dikalahkan kepentingannya. Di Indonesia gaya prosedur penyelesaian sengketa ini kemudian diberi bentuk hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan Umum, pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang tersebut, dinyatakan yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pola penyelesaian melalui ADR telah tampak dapat memberikan kepastian dari sisi waktu penyelesaian. Pada Pasal 6 ayat 4 menentukan masa waktu selama 14 hari untuk mengetahui pihak-pihak sebagai mediator dalam rangka mencari solusi penyelesaian. Dengan demikian, konflik yang telah terjadi dengan segera dapat diketahui penyelesaiannya.

Model atau mekanisme penyelesaian perkara melalui arbitrase, umumnya dikenal dalam sistem peradilan perdata, namun mengingat sistem peradilan pidana selama ini hakikatnya lebih mengedepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi), serta memberikan

wewenang yang sangat besar kepada Negara dan/atau mendelegasikan kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana. Pada tataran empiris hal ini dinilai kurang efektif dan memuaskan.

Politik criminal (*criminal Policy*), bahwa tindak criminal bisa diselesaikan melalui jalur penal dan jalur non penal. Jalur penal ditempuh dengan memfungsikan prosedur dalam sistem peradilan pidana, mulai tahap penyidikan, penuntutan persidangan sampai putusan hakim dan pemidanaan dalam lembaga permasyarakatan. Sedangkan jalur non penal, bisa dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi, agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, serta menyelesaikan penyelesaian perkara melalui jalur mediasi penal.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*, ada pula yang menyebutnya *Appropriate Dispute Resolution*.⁵ ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus perdata,⁶ tidak untuk kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal tertentu.

Walaupun pada umumnya penyelesain sengketa diluar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus

⁵ Barda Namawi Arief, 2007, ***Mediasi Penal; Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*** Penerbit Program Magister Pasca Sarjana Universitas Dipenogoro, Semarang, Hlm 12.

⁶ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian. Praktek penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai walaupun melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Mediasi penal bisa menjadi salah satu jalan yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian konflik massal yang beraspek tindak pidana. Sebagaimana diketahui dalam konflik massal sering terjadi berbagai aspek tindak pidana, seperti perusakan yang dilakukan bersama-sama melanggar Pasal 170 KUHP, penganiayaan melanggar pasal 361 KUHP.

Apabila perkara-perkara tindak pidana ini diselesaikan dengan mekanisme penegakan hukum pidana, maka selain tidak akan menyelesaikan sumber konflik berkepanjangan antar para pihak, seperti perasaan dendam dan sebagainya, yang bisa menyulut adanya konflik massal dikemudian hari. Sedangkan melalui mekanisme mediasi para pihak akan duduk bersama untuk memecahkan masalah. Korban akan terlindungi dan terlibat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Sehingga kerugian dan kelukaan yang dialaminya dapat terobati atau dipulihkan dengan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh pelaku. Hal yang diputuskan dalam mediasi adalah benar-benar merupakan kebutuhan dua belah pihak.⁷

⁷ Agung Fakhruzy, 2013, *Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana yang berkaitan dengan KDRT yang dilakukan suami terhadap istri (study di POLRES Pamekaran)*, Tesis, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Berdasarkan data Kapolres Kutai Kartanegara ada adanya bentuk konflik massal yang beraspek tindak pidana yang ditempuh oleh penyidik Polres Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, terkait dengan konflik massal yang terjadi dimasyarakat Long Bleh Modang dengan PT. Rea Kaltim Plantation yakni masyarakat menilai perusahaan REA Kaltim tersebut ingkar janji terkait pembagian plasma setelah lahan warga digunakan untuk perkebunan kepala sawit sejak tahun 2008 lalu dimana pihak perusahaan menjanjikan dua item.

Pihak perusahaan dalam hal ini menjanjikan akan siap membangun kebun plasma untuk masyarakat seluas dua hektar per Kepala Keluarga (KK)nya, dan menyanggupi menyisihkan sebagian dari kebun sawit untuk warga jika memang lahan tersebut kurang. Masyarakat sekitar perusahaan sudah muak dengan janji-janji pihak perusahaan yang ingin memberikan pembagian plasma sawit selama ini. Mereka janji memberikan lahan seluas dua hektar setiap KK karena menggunakan lahan warga desa sejak pertama kali beroperasi, namun nyatanya nihil atau tidak ada. Maka masyarakat mengharapkan kepada pihak pemerintah agar memberikan tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan efek dari konflik tersebut.

Konflik massal tersebut dalam hal ini apakah penyidik lebih banyak menempuh penyelesaian secara penal, atau melalui mediasi penal, mengingat setiap mekanisme yang ditempuh, baik melalui mekanisme prosedural secara penal maupun non penal melalui mediasi penal, masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian, walaupun dalam prakteknya yang sering terjadi pihak masyarakat yang paling banyak mengalami kerugian.

Terkait dengan hal ini yakni banyaknya masih masyarakat yang kurang mengerti apalagi terkait dengan hal perebutan hak milik.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah latar belakang konflik massal yang beraspek pidana yang terjadi antara PT. Rea Kaltim Plantation dan masyarakat sekitarnya?
2. Bagaimana penyidik dalam menentukan sebuah model yang dipergunakan untuk menyelesaikan konflik massal yang beraspek pidana yang terjadi antara PT. Rea Kaltim Plantation dengan masyarakat sekitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang konflik massal yang beraspek pidana yang terjadi antara PT. Rea Kaltim Plantation dan masyarakat sekitarnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyidik dalam menentukan sebuah model yang dipergunakan untuk menyelesaikan konflik massal yang beraspek pidana yang terjadi antara PT. Rea Kaltim Plantation dengan masyarakat sekitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi lembaga
 - a. Polres Kutai Kartanegara

Sebagai bahan masukan pihak kepolisian khususnya penyidik, dalam dasar kajian yuridis terhadap model penyelesaian sengketa konflik massal yang beraspek tindak pidana khususnya antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya, dan serta sebagai bahan masukkan bahwa pentingnya mediasi penal sebagai mekanisme

penyelesaian konflik massal yang beraspek tindak pidana guna terwujudnya keadilan.

b. Universitas Brawijaya Malang

Penelitian ini sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa Fakultas Hukum serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya penyelesaian konflik hukum pidana melalui mediasi penal.

2. Bagi masyarakat

Memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam kajian yuridis terhadap model penyelesaian konflik massal yang beraspek tindak pidana khususnya antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

3. Bagi penulis

Bermanfaat bagi penulis untuk menyusun tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

E. Tinjauan Teoritik

1. Teori Konflik

Kata konflik mengandung banyak pengertian. Ada pengertian yang negatif, konflik dikaitkan dengan sifat-sifat kekerasan dan penghancuran. Dalam pengertian positif, konflik dihubungkan dengan peristiwa hal-hal baru, pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan. Sedangkan dalam pengertian yang netral, konflik diartikan sebagai akibat biasa dari

keanekaragaman individu manusia dengan sifat-sifat yang berbeda, dan tujuan hidup yang tidak sama pula.⁸

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, Konflik adalah pertentangan atau pertikaian suatu proses yang dilakukan orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Oleh karena itu konflik diidentikkan dengan tindakan kekerasan.⁹

Konflik menurut Karl Marx, Konflik adalah satu kenyataan sosial yang bisa ditemukan dimana-mana. Bagi Karl Marx, konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis dari konflik sosial ini bisa bermacam-macam yakni konflik antarindividu, konflik antar kelompok, dan bahkan konflik antar bangsa. Tetapi bentuk konflik yang paling menonjol menurut Karl Marx, adalah konflik yang disebabkan oleh cara produksi barang-barang material.¹⁰

Menurut Daniel Webster, mendefinisikan konflik sebagai berikut:

- a. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain.
- b. Keadaan atau perilaku yang bertentangan (misalnya pertentangan pendapat kepentingan, atau pertentangan individu).
- c. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang bertentangan dan perseteruan.

⁸Kartini Kartono, 1998, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 213.

⁹Soerjono Soekanto, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 86.

¹⁰George Ritzer dan Douglas J. Gooman, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Prenada Media, Jakarta, Hlm 73.

Konflik cenderung menimbulkan respon-respon yang bernada ketakutan dan kebencian, padahal konflik itu sendiri merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam pengembangan dan perbuatan. Konflik juga dapat memberikan akibat yang merusak terhadap diri seseorang, anggota kelompok, maupun terhadap masyarakat. Sebaliknya konflik juga dapat membangun kekuatan yang konstruktif dalam hubungan kelompok. Konflik merupakan suatu sifat dan komponen yang penting dari proses kelompok, yang terjadi melalui cara-cara yang digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama lain.¹¹

Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya, manusia di dunia ini pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam skala antar perorangan sampai antar negara. Konflik yang bisa dikelola secara arif dan bijaksana akan mendominasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan. Namun dalam catatan sejarah masyarakat dunia, konflik sering diikuti oleh bentuk-bentuk perbedaan pendapat, kekerasan, seperti perang dan pembantaian.¹²

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik. Coser memberikan perhatian terhadap asal muasal konflik sosial, sama seperti pendapat Simmel bahwa ada keagresifan atau permusuhan dalam diri seseorang, dan dia memperhatikan bahwa dalam hubungan intim dan

¹¹ Wahyu, 1986, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Usaha Nasional, Surabaya, Hlm 158.

¹² Novri Susan, 2009, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*, Kencana, Jakarta, Hlm 5-6.

tertutup, antara benci dan cinta hadir. Coser memberikan dua dasar yang melatarbelakangi terjadinya konflik:

- a. Konflik realistik: memiliki sumber yang konkret atau bersifat material, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber perebutan itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik.
- b. Konflik *non-realistis*: konflik terjadi karena didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya.

Coser memberi perhatian pada adanya konflik eksternal yang mampu memperkuat identitas konflik. Ia menyatakan konflik membuat batasan diantara dua kelompok. Dalam sistem sosial dengan memperkuat kesadaran dan kesadaran kembali atas keterpisahan, sehingga menciptakan kesadaran identitas kelompok dalam sistem. Selain konflik eksternal, konflik internal memberi fungsi positif terhadap kelompok identitas mengenai adanya kesalahan perilaku, ada perilaku anggota yang dianggap menyimpang dari teks norma kelompok sehingga perlu dikoreksi oleh kelompok tersebut. Selain itu konflik internal merupakan mekanisme bertahan dari eksistensi suatu kelompok.¹³

Adapun bentuk-bentuk konflik yang akan menggambarkan persoalan sikap, perilaku dan situasi yang ada, antara lain:

¹³ *Ibid*, Hal. 54-56.

a. Pada taraf di dalam diri seseorang

Yaitu konflik yang menunjukkan adanya pertentangan, ketidakpastian, atau emosi-emosi dan dorongan-dorongan yang antagonis di dalam diri seseorang.

b. Pada taraf kelompok

Konflik-konflik ditimbulkan dari konflik-konflik yang terjadi didalam diri individu dari perbedaan-perbedaan pada para anggota kelompok dalam tujuan-tujuan, nilai dan norma, motivasi mereka untuk menjadi anggota kelompok, serta minat-minat mereka.

c. Pada taraf masyarakat

Konflik bersumber pada perbedaan diantara nilai dan norma kelompok dengan nilai-nilai dan norma kelompok lain di dalam masyarakat tempat kelompok yang bersangkutan berada. Perbedaan perbedaan dalam tujuan, nilai dan norma serta minat.

Selain itu terdapat tipe-tipe konflik, yaitu tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di permukaan, dijelaskan sebagai berikut:

a. Tanpa konflik yaitu menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubungan-hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai, tipe ini bukan berarti tidak ada konflik dalam masyarakat, akan tetapi ada kemungkinan atas situasi ini.

- 1) Pertama, masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang bersifat mencegah ke arah politik kekerasan.
- 2) Kedua, sifat budaya yang memungkinkan anggota masyarakat menjauhi permusuhan dan kekerasan.

- b. Konflik laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar biasa ditangani.
- c. Konflik terbuka adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, serta memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan efeknya.
- d. Konflik di permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka bentuk konflik dalam penelitian ini yaitu konflik terbuka. Konflik bersumber pada kemarahan kelompok masyarakat long bleh modang dan masyarakat sekitar terhadap Perusahaan Kelapa Sawit PT. Rea Kaltim Plantation. Masyarakat menilai perusahaan REA Kaltim tersebut ingkar janji terkait pembagian plasma setelah lahan warga digunakan untuk perkebunan kepala sawit sejak tahun 2008 lalu. pihak perusahaan menjanjikan dua item.

Pertama, pihak perusahaan siap membangun kebun plasma untuk masyarakat seluas dua hektare per Kepala Keluarga (KK)-nya, dan menyanggupi menyisihkan sebagian dari kebun sawit untuk warga jika memang lahan tersebut kurang. Masyarakat sekitar perusahaan sudah muak dengan janji-janji pihak perusahaan yang ingin memberikan pembagian plasma sawit selama ini. Mereka janji memberikan lahan seluas dua hektar setiap KK karena menggunakan lahan warga desa sejak pertama

¹⁴ *Ibid*, Hal, 92-93.

kali beroperasi, namun nyatanya nihil atau tidak ada. Maka masyarakat mengharapkan kepada pihak pemerintah agar memberikan tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan efek dari konflik tersebut.

2. Teori Negara Hukum

Negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.¹⁵ Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum (negara) untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum.

Pemikiran mengenai negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri, gagasan itu merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Apabila melihat sejarah perkembangan pemikiran filsafat mengenai negara hukum dimulai sejak tahun 1800 S.M.¹⁶ Perkembangannya terjadi sekitar abad XIX sampai dengan abad XX. Menurut Jimly Ashiddiqie, gagasan pemikiran mengenai negara hukum berkembang dari tradisi Yunani Kuno.¹⁷

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu

¹⁵ Djazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, Hlm 9.

¹⁶ S.F. Marbun, 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol. 4, 1997, Hlm 9.

¹⁷ Jimly Ashiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Hlm 11.

seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjung tinggi hukum tanpa terkecuali.¹⁸

Menurut Krabe, negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang.¹⁹

Negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.²⁰

Menurut Utrecht, prinsip-prinsip negara hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum yang bersifat modern.²¹

Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada tugas negara. Dalam artian formil tugas negara adalah melaksanakan

¹⁸B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, Hlm 17.

¹⁹Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 181.

²⁰Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, Hlm 153.

²¹Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, Hlm 9.

peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal sebagai negara penjaga malam (*nachtwackerstaats*). Sementara dalam artian materiil tugas negara tidak hanya sebatas menjaga ketertiban saja, melainkan juga kehadiran negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (*welfarestate*). Fungsi negara dalam arti materiil menjadikan yang utama bagi sebuah negara adalah bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat (*public service*), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.²²

Negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurfunctie*) dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal (klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.²³

Menurut Anthony Giddens, fungsi negara yang demikian tersebut menjadikan negara mempunyai sifat *intervensionis*, artinya bahwa negara selalu akan ambil bagian dalam setiap gerak dan langkah masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karena nya tugas negara menjadi sangatlah luas dan menjangkau setiap aspek kehidupan masyarakat dalam segala bidang mulai dari sosial budaya, politik, agama, teknologi, pertahanan keamanan, bahkan kalau perlu

²² B. Hestu Cipto Handoyo, *Op.cit*, Hlm 2.

²³ W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, Hlm 1.

masuk kedalam kehidupan privat warga negara nya (misal mengatur perkawinan, agama dan lain sebagainya).²⁴

Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maka tetap diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara hukum modern, adapun unsur-unsur terpenting dalam negara hukum, yaitu kesejahteraan, antara lain :

- a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan/pembagian kekuasaan;
- c. Legalitas Pemerintahan;
- d. Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak; dan
- e. Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara.²⁵

Berdasar pada penjabaran negara hukum materiil atau negara kesejahteraan diatas, sesuai dengan tujuan negara, maka pemerintahan Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui penyelenggaraan kepentingan umum (*social service atau public service*). Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, yang pada umumnya terdiri dari tugas mengatur dan tugas mengurus, yang muara nya adalah perwujudan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Menurut Maria Farida, prinsip negara hukum Indonesia adalah negara hukum pengurus (*Verzorgingstaat*). Apabila dicermati secara sungguh-sunggu negara hukum ini sangat mendekati konsep negara

²⁴ Anthony Giddens, 1998, *The Third Way : Jalan Ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta, Hlm 100.

²⁵ B. Hestu Cipto Handoyo, *op.cit*, Hlm 2.

hukum kesejahteraan (*welfarestaat*). Hal ini dapat dipahami melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea IV, yang selanjutnya dirumuskan:

".... negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
...²⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka eksistensi bangsa dan negara Indonesia memiliki tantangan besar dalam hal perwujudan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Bukan hanya karena Indonesia menganut paham negara hukum kesejahteraan, namun juga dikarenakan janji kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai kontrak sosial tertinggi telah tercantum dalam konstitusi dan hal tersebut haruslah dilunasi demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara umum , pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah "*Policy*" atau "*beleid*" khususnya dimaksudkan dalam arti "*Wijsbeleid*" ,menurut Robert R.Mayer dan Ernest Greenwood, dapat Dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif,²⁷ David L,Sills Menyatakan bahwa Pengertian Kebijakan (*Policy*) adalah menyatakan bahwa pengertian kebijakan(*Policy*) adalah suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema

²⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Jakarta, Hlm 1.

²⁷ Sultan Zanti Arbi , Dan Wayan Ardana , 1997, *Rancangan Penelitian dan kebijakan sosial*, CV.Rajawali, Jakarta, Hlm 63.

tertentu dan bagaimana cara melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.²⁸

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan social, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁹

Amara Raksasatya mengemukakan *policy* sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu *policy* memuat 3 (tiga) elemen yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- b. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Menurut Marc Ancel, pengertian *Penal Policy* (kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-

²⁸ Barda Nawawi Arif , 1994, ***Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara***, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm 63.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, ***Teori-teori dan Kebijakan Pidana***, Alumni, Bandung, hlm 148.

undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³⁰

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal menurut Prof. Sudarto "Politik Hukum" adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.³¹
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengepresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³²

Bertolak dari pengertian demikian Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan "Politik Hukum Pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³³ Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁴

³⁰Barda Nawawi Arif, 2002, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 23

³¹Sudarto, 1981, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, hlm 159

³² Sudarto, 1983, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Bandung, hlm 20

³³Sudarto, Op Cit, hlm 161

³⁴Sudarto, 1983, Op Cit, hlm 93 dan 109

Sebagai bagian dari politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal dengan perkataan lain dilihat dari sudut politik criminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".³⁵

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang

³⁵ Barda Nawawi Arief, 2011, **Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)**, Kencana, Jakarta, hlm 28.

hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.³⁶

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dimana menurut Iskandar bahwa, "Metode studi kasus bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang lebih efisien,³⁷ maknanya peneliti mengadakan telaah secara mendalam tentang suatu kasus, kesimpulan hanya berlaku atau terbatas pada kasus tertentu saja". Menurut Creswell bahwa studi kasus merupakan, "Suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*).³⁸ Suatu kasus menarik diteliti karena corak khas kasus tersebut yang memiliki arti orang lain, minimal peneliti". Muhammad dkk, merinci keunggulan studi kasus sebagai berikut:³⁹

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 155.

³⁷ Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi, Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*, Gaung Persada, Jakarta, Hlm 54.

³⁸ Raco, J.R, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Hlm 90.

³⁹ Muhammad, Farouk. Dkk, 2008, *Metodologi Penelitian: Modul A2536/2SKS*, PTIK, Jakarta, Hlm 36.

- a) Studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar konsep serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas.
- b) Studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia.
- c) Studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar belakang permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam, dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial.

Terkait dengan hal ini, maka kasus yang menjadi fokus bagi penulis adalah penyelesain konflik massal yang beraspek tindak pidana melalui mediasi penal (Studi di Polres Kutai Kartanegara).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis menurut Abdulkadir Muhammad adalah dimana peneliti dalam merumuskan masalah dan tujuan perlu berpedoman pada klasifikasi perilaku yudisial dan perilaku nonyudisial, sehingga fokus penelitian hukum empiris lebih terarah. Tiga pendekatan perilaku yang dapat digunakan:

a. Pendekatan perilaku yudisial

Pada pendekatan perilaku yudisial, jenis perilaku pada setiap peristiwa hukum sudah dibakukan oleh pengadilan. Penulis hanya mengidentifikasi wujud pola perilaku tersebut pada setiap peristiwa hukum. Berdasarkan kenyataan itu, penulis menyesuaikan dengan pola standar yang ditetapkan pengadilan guna menentukan bahwa perilaku itu adalah wujud pola perilaku yang sudah umum diakui dan

dibenarkan oleh masyarakat. Kebenaran tersebut dapat diketahui melalui peristiwa hukum yang menjadi sumber perilaku dan peristiwa hukum itu berakhir tanpa terjadi konflik.

b. Pendekatan perilaku nonyudisial

Pada pendekatan perilaku nonyudisial, jenis perilaku pada setiap peristiwa hukum bebas dilakukan dan dikembangkan oleh anggota masyarakat dengan kesadaran hukumnya sendiri sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat. Untuk melakukan pendekatan terhadap perilaku nonyudisial ini, penulis perlu memahami kriteria penilaian benar atau tidaknya perilaku pada setiap peristiwa hukum. Kriteria tersebut adalah:

1. Mencapai tujuan pihak-pihak atau pelakunya;
2. Menguntungkan pihak-pihak atau pelakunya; dan
3. Tidak dilarang undang-undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak bertentangan dengan etika masyarakat (*social ethics*).

c. Pada pendekatan perilaku gabungan, perilaku nonyudisial akan dikontrol oleh perilaku yudisial menjadi tolak ukur perilaku nonyudisial, sejauh berkembang kearah yang positif.⁴⁰

Dari tiga pendekatan di atas maka dengan ini penulis menggunakan pendekatan perilaku yudisial, jenis perilaku pada setiap peristiwa hukum bebas dilakukan dan dikembangkan oleh anggota masyarakat dengan kesadaran hukumnya sendiri sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini dikaitkan dengan judul tesis ini maka penulis ingin melihat sejauh mana penyelesain konflik massal yang beraspek tindak pidana melalui mediasi penal (Studi di Polres Kutai Kartanegara).

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit*, hal. 166.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, dengan pertimbangan Polres Kutai Kartanegara pernah menangani Konflik massal yang beraspek tindak pidana, Khususnya antara PT. REA KALTIM PLANTATION dengan Masyarakat sekitarnya, sehingga terdapat data yang mencukupi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari nara sumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni Polres Kutai Kartanegara
- b. Data sekunder, yaitu data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.⁴¹

⁴¹Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hlm 65.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup data primer, data sekunder, dan data tersier.⁴² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

- a) Data primer yaitu bahan hukum peraturan Perundang-undangan.
- b) Data sekunder, yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁴³ Seperti: perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.
- c) Data tersier yaitu data yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari: kamus hukum, koran dan *Black Law Dictionary*.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dari sejumlah narasumber yang menyangkut informasi tentang penerapan mediasi penal dalam penyelesaian konflik massal di Polres Kutai Kartanegara. Kemudian sumber data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data (*input*) merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung (*primary*) atau tidak langsung (*secondary*) untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan (*process*)

⁴² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 13.

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 12.

suatu penelitian secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (*output*) dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti. Terkait dengan hal tersebut, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam pengumpulan data bersifat primer, maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan pengamatan. Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴⁴ Sedangkan menurut Selltiz, bahwa yang ingin diperoleh dari wawancara adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Sasaran isi untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta.
2. Isi yang mempunyai sasaran untuk memastikan kepercayaan tentang keadaan fakta.
3. Isi yang mempunyai sasaran untuk memastikan perasaan.
4. Isi yang mempunyai sasaran untuk mengetahui perilaku sekarang atau perilaku terdahulu.
5. Isi yang mempunyai sasaran mengetahui alasan-alasan.

Wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) terhadap sumber informasi yang mengetahui dan memahami terjadinya peristiwa hukum terhadap penyelesaian konflik massal yang beraspek tindak pidana melalui mediasi penal (Studi di Polres Kutai Kartanegara).

⁴⁴Raco, *Ibid*, Hal. 186.

⁴⁵ Moh Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 197.

Teknik wawancara yang digunakan adalah tidak berstruktur atau tidak terstandarisasi karena dipertimbangkan akan lebih fleksibel dan terbuka. Dengan wawancara secara tidak berstruktur, akan memudahkan memodifikasi, mengulangi, menguraikan pertanyaan yang ditanyakan dan dapat mengikuti jawaban yang diberikan sumber informasi, sehingga tidak menyimpang dari fokus penelitian ini. Disini untuk merangkum informasi yang diperoleh melalui wawancara, maka dilakukan *recording* dengan menggunakan alat perekam terhadap jawaban yang diberikan sumber informasi. Selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara secara tertulis dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kehilangan informasi.

Teknik pengumpulan data lainnya dilakukan peneliti dengan pengamatan, dimana Muhammad dan Djaali, menjelaskan bahwa pengertian dari pengamatan adalah "Cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan".⁴⁶ Dengan adanya pengamatan maka memudahkan peneliti untuk memperoleh sejumlah data secara langsung, sehingga mencerminkan obyektifitas pada penelitian ini. Dalam pengamatan maka peneliti akan mengamati mengenai peristiwa hukum dan cara penggunaan wewenang oleh kepolisian yaitu dalam penyelesaian konflik massal yang beraspek tindak pidana melalui mediasi penal (Studi di Polres Kutai

⁴⁶ Muhammad, Farouk dan H. Djaali, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial*, Restu Agung, Jakarta, Hlm 31.

Kartanegara). Dengan adanya pengamatan tersebut memudahkan peneliti memahami konteks-konteks kehidupan bersama dan kondisi-kondisi yang berpotensi konflik di masyarakat.

b. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi studi kepustakaan. Di sini peneliti mengambil sejumlah data dan bahan yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian ini dengan lancar, dan sesuai permasalahan yang diangkat yaitu penyelesain konflik massal yang beraspek tindak pidana melalui mediasi penal (Studi di Polres Kutai Kartanegara).

Adapun sumber data sekunder diperoleh peneliti dari:

1. Studi kepustakaan (*Bibliogaraphy study*)

Studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dalam tesis ini, dan melakukan pengumpulan data melalui perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti dan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini.

2. Studi dokumentasi (*document study*)

Studi dokumentasi adalah dengan mengkaji berbagai dokumen-dokumen resmi pemerintah yang berupa Peraturan Bupati dan arsip-arsip yang dapat menunjang penelitian ini tentunya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteleti.

6. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis Yuridis Kualitatif, yaitu memperhatikan hierarki perundang-undangan, peraturan yang satu dengan lainnya tidak boleh saling bertentangan, serta adanya kepastian hukum bahwa perundang-undangan yang berlaku betul-betul dilaksanakan baik oleh penguasa atau para penegak hukum.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan teknik analisis data dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Melakukan seleksi/reduksi terhadap data yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh, baik bersumber dari studi kepustakaan maupun lapangan (wawancara serta pengamatan), akan dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok data sesuai fokus dan permasalahan dalam penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan peneliti untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang data yang tidak perlu dan mengatur data yang telah diperoleh selama penelitian. Data mentah tersebut selanjutnya akan direduksi antara data yang satu dengan yang lainnya, yang disusun secara sistematis.
- b. Data yang sudah direduksi selanjutnya akan disajikan secara sistematis dan menurut kelompoknya masing-masing. Penyajian data ini dapat berupa gambar, tabel, dan hasil wawancara yang bermanfaat untuk menganalisis, guna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan penarikan kesimpulan. Hal ini juga untuk

⁴⁷Muhammad, Farouk dan H. Djaali, *Ibid*, Hlm 97.

membantu mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan sudah cukup dan sesuai dengan fokus dalam penelitian ini. Apabila belum maka akan dilakukan kegiatan pengumpulan data tambahan untuk mendukung penarikan kesimpulan dalam penelitian ini.

- c. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil melihat secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat dan jelas.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagai suatau gambaran dan mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan secara singkat atas penelitian ini, maka Penulis bagi dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan hal-hal penting karena sebagai awal penulisan, diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

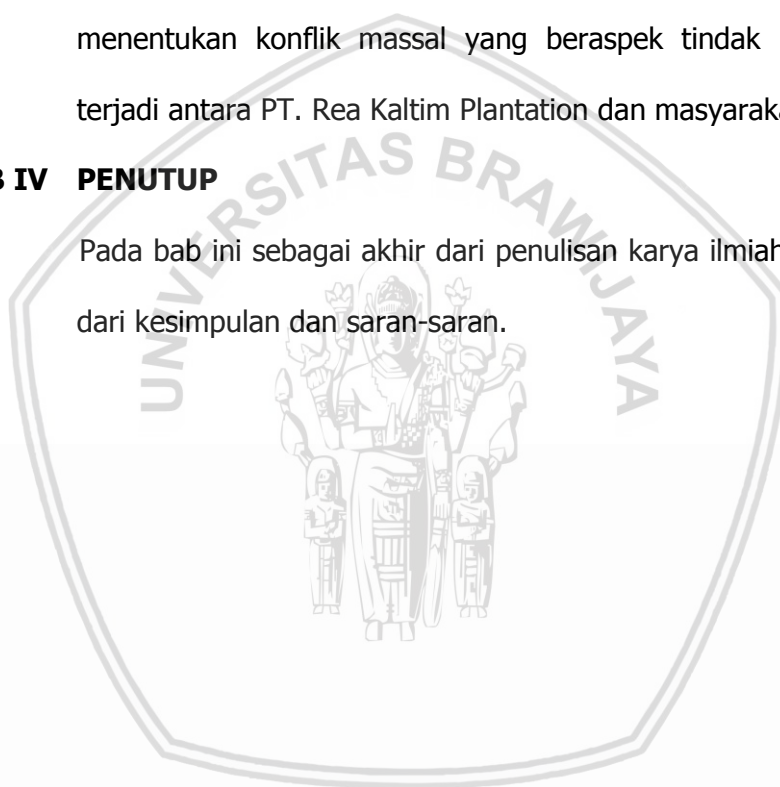
Bab ini memberikan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan dan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai bab ini akan membahas mengenai konsep penyelesaian konflik, konsep tindak pidana, konsep mediasi penal dan konsep penegakan hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Pembahasan ini membahas dan menjawab permasalahan yang difokuskan yaitu latar belakang konflik massal yang beraspek tindak pidana yang terjadi antara PT. Rea Kaltim Plantation dan masyarakat sekitar dan membahas bagaimana penyidik dalam menentukan konflik massal yang beraspek tindak pidana yang terjadi antara PT. Rea Kaltim Plantation dan masyarakat sekitar.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini sebagai akhir dari penulisan karya ilmiah yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Penyelesaian Konflik

Menurut Nader dan Todd, ada beberapa kemungkinan penyelesaian perkara yang digunakan dalam berbagai masyarakat didunia. Bentuk-bentuk penyelesaian perkara tersebut berupa adjudikasi (*adjudication*), arbitrase (*arbitration*), mediasi (*mediation*), paksaan (*coercion*), Penghindaran (*avoidance*), dan biarkan saja (*lumping it*).¹ Demikian juga dikatakan Donald Black,² bahwa dewasa ini, sebagaimana berabad-abad seilam, orang-orang yang mempunyai perkara atau persengkataan dengan pihak lain, dapat masing-masing memilih dari cara penanganan konflik, yakni :

- 1) Penangan sendiri (*self-help*)
- 2) Penghindaran/pengelakan (*avoidance*)
- 3) Negoisasi (*Negotiation*)
- 4) Penyelesaian oleh pihak ketiga atau mediasi (*settlement by a third party*)
- 5) Tolerandi (*toleration*)

Berdasarkan paparan Nader dan Tood, serta Donald Black diatas, maka penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasarkan ketentuan hukum atau pengadilan. Pertimbangan–pertimbangan untuk menentukan bentuk penyelesaian sepenuhnya menjadi hak korban, terutama dalam perkara

¹ Nader and todd, 1978, *The Disputing Process-law in Ten Societies*, Colombia University Press, Newyork Hlm 21-26.

² Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* Hlm 103.

perdata dan perkara pidana, khususnya untuk delik-delik aduan. Dalam kaitan ini, Galanter menyatakan penyelesaian sengketa atau perkara dalam suatu masyarakat dapat dilakukan dimana-mana, tidak hanya dilakukan oleh lembaga pengadilan tetapi dapat diselesaikan oleh berbagai forum dalam lingkungan sosialnya, yang dilandasi oleh apa yang disebut hukum asli (*indigeneous law*).³ Pandangan Galanter ini menjelaskan bahwa penyelesaian perkara dalam masyarakat tidak hanya terjadi dalam konteks hukum formal atau hukum Negara saja, melalui lembaga pengadilan, tetapi juga dapat dilakukan dalam konteks hukum informal dalam lingkungan sosial tertentu diluar lembaga pengadilan.

Penyelesaian perkara di lembaga pengadilan yang berdasarkan hukum formal dilakukan melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Dalam mengadili perkara pidana dasar hukum acaranya adalah KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), sedang dalam mengadili perkara perdata, prosedur beracaranya menurut HIR (*Herziene inlandsc Regleement*). Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila tidak ditaati secara sukarela dapat dijalankan secara paksa oleh aparaturnya Negara yang diberi kewenangan hukum untuk itu. Keputusan pengadilan yang dapat dijalankan secara paksa tersebut, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berpekar.

Sementara penyelesaian perkara berdasarkan nilai-nilai sosial diluar hukum formal, yakni hukum informal, berorientasi kepada tercapainya

³ Galanter Marc, 1998, *Justice In Many Rooms: Court, Private Ordering, And indigenious Law*. Journal of Legal Pluralism, Hlm 17.

perdamaian dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan keputusannya dilandaskan pada nilai-nilai cultural, bukan nilai-nilai structural-fungsional sebagaimana dalam hukum formal.

Keadilan, sebagaimana dikatakan Galanter di atas, tidak hanya ditemukan di lembaga-lembaga formal yang diselenggarakan oleh Negara, tetapi dapat juga ditemukan diberbagai lingkungan sosial, seperti lingkungan tetangga, tempat kerja dan sebagainya.⁴ Keadilan yang diperoleh di luar lembaga-lembaga formal yang disediakan Negara, bukanlah keadilan formal, yang menurut John Rawls merupakan keadilan yang bertumpu pada aturan-aturan atau prosedur-prosedur formal yang dibuat Negara,⁵ melainkan keadilan substantif yang bertumpu pada norma-norma dan harapan-harapan mengenai cara berperilaku yang pantas dan sama-sama diketahui, dan apabila dilanggar akan mengakibatkan terjadinya sanksi yang bersifat fisik dan non fisik.

2. Konsep Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

"Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)."⁶

⁴ *Op.cit*, Hal. 90.

⁵ John Rawls, 2010, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: terjemahan Uzair Fauan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar. Hal.47.

⁶ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm 9.

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁷

Menurut S.R. Sianturi tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung-jawab).⁸

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁹

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;

⁷ P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat*, PT.Citra Aditya Bakti, Hlm 182.

⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, Hlm 25.

⁹ *Ibid.*

- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan kejangalan seperti "peristiwa Pidana" (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).¹⁰

Berdasarkan uraian diatas maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹¹

Tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan dari pada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

¹⁰ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana ICetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 231-232.

¹¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Cetakan Kedua*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 48.

3. Konsep Mediasi Penal

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain, *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters* yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut *Der Außergerichtliche Tatausgleich* dan dalam istilah Perancis disebut *de mediation pénale*. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah *Victim Offender Mediation (VOM)*, *Täter Opfer Ausgleich (TOA)*, atau *Offender victim Arrangement (OVA)*.¹²

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution*, ada pula yang menyebutnya *Apro-priate Dispute Resolution*.¹³ ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata¹⁴, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus

¹² Makalah, **Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan**, yang disajikan dalam Seminar Nasional "**Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance**", Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007 dan dari makalah "**Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan**" dalam "**Dialog Interaktif Mediasi Perbankan**", Di Bank Indonesia Semarang, 13 Desember 2006.***) Di Austria terdiri dari ATA-J (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Jugendliche*) untuk anak, dan ATA-E (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Erwachsene*) untuk orang dewasa.

¹³ New York State Dispute Resolution Association, Inc., **Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview**, sbr internet.

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof. Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan *restitusi* dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.¹⁵

Mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut : ¹⁶

a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung*)

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal

¹⁵ Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), **Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications.**

¹⁶ Stefanie Tränkle, ***The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Mediation - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France***, Diakses: http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html.

ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*):

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya.

c. Proses informal (*Informal Proceeding - Informalität*):

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivierung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Dalam *Explanatory memorandum* dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang *Mediation in Penal Matters*, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut : ¹⁷

a. *informal mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi,

¹⁷ *Ibid.*

atau oleh Hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

b. *Traditional village or tribal moots*

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya.

1. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/ pedalaman.
2. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.
3. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

c. *victim-offender mediation*

1. Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.
2. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
3. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pembedaan atau setelah pembedaan.

4. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang khusus untuk anak, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk *recidivist*.

d. *Reparation negotiation programmes*

1. Model ini semata-mata untuk menaksir/ menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.
2. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel.
3. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi

e. *Community panels or courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. *Family and community group conferences*

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan parti-sipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan

pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban.

Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

4. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bentuk nyata dalam melaksanakan hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum yakni aparat penegak hukum terhadap materi atau substansi hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum.

Penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Jimly Assidhique dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*Alternative dispute or conflicts resolution*).¹⁸

Dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat pada subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.¹⁹

¹⁸ Jimly Assidhique, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Hlm 22.

¹⁹ Ibid, hlm 22.

Penegakan hukum dalam arti sempit menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran serta aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan karena itu aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim.²⁰

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Sementara itu penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) terkandung didalamnya makna politik kriminal (*criminal policy*) menurut Barda Nawawi Arief yaitu upaya yang rasional untuk menanggulangi

²⁰ Ibid

kejahatan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui pendekatan kebijakan dalam arti, adanya keterpaduan antara politik kriminal dengan politik sosial dan keterpaduan antara penggunaan upaya penal dan non penal.²¹ Penanganan masalah lingkungan melalui perangkat hukum administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum non penal. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan essensinya adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, Ninik Suparni menandakan²² bahwa, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara *preventif*, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dan dapat juga dilakukan secara *represif*, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.²³

Untuk menjaga agar lingkungan tidak rusak semakin parah, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan secara dini. Salah satu bentuk pencegahan dini berupa pengawasan secara intensif terhadap usaha atau

²¹ Barda Nawawi Arief, 1996, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, Citra Aditya, Bandung, hlm 26-27.

²² Ninik Suparni, 1992, ***Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup***, Sinar Galia, Jakarta, hlm 160-161.

²³ Syahrul Machmud, 2012, ***Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia***, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 35

kegiatan yang melanggar ketentuan hukum administrasi. Segera dilakukan penindakan terhadap pelanggar hukum administrasi tersebut. Penindakan hukum administrasi jika dilakukan secara optimal, maka dapat dipastikan bahwa lingkungan tidak akan sempat tercemar apalagi rusak.

Upaya tersebut merupakan upaya non penal yang harus didorong sebagai sarana menyelesaikan masalah lingkungan secara dini. Jika upaya ini tidak atau kurang berhasil, maka barulah penindakan secara pidana didayagunakan.



BAB III PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 km² terletak antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Barat serta diantara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 Kecamatan. Kedelapan belas Kecamatan tersebut adalah Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang. Selain dari pada itu Kutai Kartanegara terbagi menjadi 227 Desa/Kelurahan yang semuanya merupakan Desa/Kelurahan Swadaya.

Kecamatan (Wilayah Pesisir) meliputi 6 (enam) kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:

1. Kecamatan Anggana, dengan luas wilayah 1.798,80 Km² atau 179.880 Ha;
2. Kecamatan Sanga-Sanga, dengan luas wilayah 233,40 Km² atau 23.340 Ha;

3. Kecamatan Muara Jawa, dengan luas wilayah 754,50 Km² atau 75.450 Ha;
4. Kecamatan Marang Kayu, dengan luas wilayah 1.165, 71 Km² atau 116.571 Ha;
5. Kecamatan Muara Badak, dengan luas wilayah 939,09 Km² atau 93.909 Ha; dan
6. Kecamatan Samboja, dengan luas wilayah 1.045,90 Km² atau 104.590 Ha.¹

Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang tersebar pada hampir semua Kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 kilometer.

Kabupaten Kutai Kartanegara secara administratif berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makasar.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Panajem Pasir Utara dan Kota Balikpapan.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat.

¹ [Http://Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan](http://DirektoratJendralKelautan,PesisirdanPulau-pulauKecil,KementerianKelautandanPerikanan), akses 12 Desember 2014.

Dataran Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat hampir di seluruh Kecamatan, yaitu ada sekitar 10 gunung. Gunung yang paling tinggi di Kutai Kartanegara yaitu gunung lengkup dengan ketinggian 485 meter yang terletak di Kecamatan Loa Kulu. Sedang untuk danau yang berjumlah sekitar 16 buah, danau yang paling luas yaitu Danau Semayang dengan luas 13.000 hektar.

Sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan merupakan potensi sumber daya alam yang terbarukan (*renewable resources*). Adapun hasil dari sektor ini merupakan kebutuhan dasar dalam pemenuhan terhadap kecukupan gizi masyarakat sehingga dapat mengetahui tingkat ketahanan pangan di suatu daerah, selain itu juga sebagai salah satu bahan dasar dalam sektor industri pengolahan.

Luasa tanaman padi pada tahun 2009 seluas 3.060 hektar yang menghasilkan sebanyak 15.152 ton padi, terdiri dari 14.763 ton padi sawah dan 479 ton padi ladang.

Petani yang mengusahakan perkebunan karet pada tahun 2009 sekitar 310 Kepala Keluarga dengan luas areal sekitar 606 hektar yang

terdiri dari 0 hektar tanaman baru, 182 hektar tanaman belum menghasilkan, 310 hektar tanaman menghasilkan dan 114 hektar tanaman tua/tanaman rusak. Produksi karet yang dihasilkan 817 ton.

Produksi kelapa sawit pada tahun 2009 sekitar 6.540 ton, yang diusahakan oleh sekitar 1.560 Kepala keluarga. Luas areal perkebunan kelapa sawit sekitar 1.671 hektar yang terdiri dari 0 hektar tanaman baru, 484 hektar tanaman belum menghasilkan, 1.187 hektar tanaman menghasilkan, dan 0 hektar tanaman tua/tanaman rusak.

Petani yang mengusahakan perkebunan lada sekitar 886 Kepala Keluarga dengan luas areal sekitar 1.166 hektar yang terdiri dari 0 hektar tanaman baru, 314 hektar tanaman belum menghasilkan, 527 hektar tanaman menghasilkan, dan 325 hektar tanaman tua/tanaman rusak. Produksi lada yang dihasilkan sekitar 790 ton.

Petani yang mengusahakan perkebunan kopi sekitar 821 Kepala Keluarga dengan luas areal sekitar 673 hektar yang terdiri dari 0 hektar tanaman baru, 135 hektar tanaman belum menghasilkan, 527 hektar tanaman menghasilkan, dan 11 hektar tanaman tua/tanaman rusak.

Sedangkan produksi kelapa pada tahun 2009 sekitar 2.396 ton, yang diusahakan oleh sekitar 3.510 Kepala Keluarga. Luas areal

perkebunan kelapa sawit sekitar 3.871 hektar yang terdiri dari 0 hektar tanaman baru, 455 hektar tanaman belum menghasilkan, 2.977 hektar tanaman menghasilkan, dan 439 hektar tanaman tua/tanaman rusak.

Berdasarkan sistem usahanya sub sektor perikanan dibedakan menjadi dua yaitu perikanan tangkap (nelayan) dan perikanan budidaya, sedangkan berdasarkan lokasi usaha perikanan tangkap terbagi menjadi penangkapan diperairan laut dan perairan umum (sungai, danau) sementara perikanan budidaya terbagi menjadi budidaya di tambak, kolam dan karamba. Sekitar 172,12 milyar rupiah yang dihasilkan dari perikanan pada tahun 2009, dengan produksi ikan sekitar 7.512 ton dan diusahakan oleh sekitar 2.617 rumah tangga. Produksi ikan dari hasil penangkapan sekitar 5.380 ton yang bernilai sekitar 96,78 milyar rupiah dan hasil budidaya sekitar 2.131 ton yang bernilai sekitar 75,34 milyar rupiah.

Sampai dengan tahun 2009 pencapaian populasi ternak dapat dibedakan atas populasi sapi sebanyak 3.448 ekor, kerbau 381 ekor, kambing sebanyak 106 ekor, babi sebanyak 140 ekor. Untuk pencapaian populasi unggas dibedakan atas ayam buras sebanyak 9.009 ekor, ayam

potong 3.017.510 ekor, ayam petelur 164.000 ekor, itik sebanyak 1.042 ekor.

Kebutuhan akan asupan gizi dari protein hewan didapatkan dari daging ternak dan unggas, dimana pada tahun 2009 produksi daging sapi mencapai 121.139 kg, kerbau sebesar 0 kg, kambing sebesar 773 kg dan daging babi sebesar 0 kg. Produksi daging unggas pada tahun 2009 untuk ayam buras mencapai 15.168 kg, daging ayam potong mencapai 613.133 kg, daging ayam petelur mencapai 0 kg, dan daging itik mencapai 883 kg. Sedangkan produksi telur ayam buras mencapai 6.198 kg, telur ayam petelur 1.297.240 kg, dan telur itik mencapai 5.646 kg.

2. Profil PT. Rea Kaltim Plantation

PT REA Kaltim Plantations (REAK) didirikan pada tahun 1989 oleh REA Holdings (REAH), sebuah perusahaan publik di Inggris. Pada awalnya, lokasi perkebunan kelapa sawit ada di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan saat ini sudah berkembang dan memiliki perkebunan di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Per tanggal 31 Desember 2012, REAK grup memiliki total area 70.584 hektar, terdiri atas 36.794 hektar yang sudah dan sedang ditanami dengan kelapa sawit, dan 20.000 hektar yang dicadangkan untuk area konservasi. Selain itu, per tanggal 31 Desember 2012, REAK juga sudah membangun 2.943 hektar kebun plasma dan 1.561 hektar kebun dengan skema PPMD.

Pada tahun 1989, kelompok REA Kaltim membuka kantor di Kalimantan Timur dan mulai negosiasi untuk mendapatkan konsesi lahan. Pada tahun 1991, pengadaan lahan yang sesuai untuk penanaman telah diperoleh dari lahan bekas konsesi yang dikerjakan oleh perusahaan kayu PT Limbang Ganesa di bawah Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri - HPHTI). Pada tahun 1992, pembibitan pertama dibangun dan penanaman mulai tahun 1994. REA Kaltim menjadi anggota RSPO tahun 2007. Pada tanggal 31 Desember 2011, kelompok REA menguasai lahan pertanian di Kalimantan Timur seluas 97.698 ha, dimana 70.584 ha sudah bersertifikat HGU. 30.106 ha dikuasai oleh PT REA Kaltim Plantations. Alokasi lahan tersebut terdiri dari lahan inti yang berada di kiri dan kanan sungai Belayan (PT REA Kaltim Plantations, anak perusahaan utama yang menjalankan usaha group) bersama dengan area kebun plasma yang berada tidak terlalu jauh dari kawasan inti. Perusahaan ini memproduksi CPO, Palm Kernel dan PKO. Sampai dengan 31 Desember 2011, luas lahan yang telah ditanami kelapa sawit mencapai 37.084 ha, dimana 25.415 ha merupakan tanaman menghasilkan. Group ini masih berniat menanam seluruh lahan mereka yang cocok dengan kelapa sawit (selain kawasan yang dijadikan konservasi) sesuai dengan Prosedur Penanaman Baru RSPO. Selain perkebunan kelapa sawit, REA Holdings PLC juga telah mengantongi hak usaha 3 konsesi pertambangan batu bara di Kalimantan Timur (*Liburdinding Muser* dan Kota Bangun) dimana group ini sedang membangun usaha pertambangan batu bara terbuka. PT REA Kaltim Plantations memiliki PT REA Kaltim Plantations - 177 - 2 pabrik (PO1

Perdana POM dan PO2 Cakra POM) yang menerima buah dari 6 kebun, plasma dan petani mandiri, atau Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD). 26 Enam kebun konsesi PT REA Kaltim Plantations adalah: Perdana (3.850 ha tertanam), Lestari (3.849 ha tertanam), Sentekan (4.008 tertanam), Cakra (4.675 ha tertanam), Damai (2.005 ha tertanam) dan Berkat (4.460 ha tertanam). Total lahan (hektar) PT REA Kaltim Plantations 30.106 Kawasan konservasi 5.363 Kebun plasma 1.90527 Kebun PPMD 1.56128 Lokasi konsesi perkebunan kepala sawit REA Holdings PLC di Kalimantan Timur. Sumber: Laporan Tahunan 2011 REA Holdings PLC. PT REA Kaltim Plantations Lokasi perkebunan, kawasan konservasi dan plasma PT Rea Kaltim Plantations Terdapat sembilan desa di dalam konsesi PT Rea Kaltim Plantations yaitu : 1. Long Beleh Haloq 2. Long Beleh Modang 3. Muai 4. Pulau Pinang 5. Perdana 6. Bukit Layang 7. Kelekat 8. Kembang Jenggut 9. Long Lalang Di saat perusahaan memberitahukan konsorsium NGO atas sembilan desa yang berada di dalam HGU perusahaan (dan audit mendaftar ada tujuh), anggota masyarakat menegaskan masih banyak desa lain yang setidak-tidaknya kawasan desa mereka masuk dalam konsesi perusahaan. Desa yang didata oleh anggota masyarakat masuk dalam konsesi perusahaan adalah: Kembang Jenggut, Hambau, Kelekat, Bukit Layang, Muai, Perdana, Pulau Pinang, Long Beleh Haloq, Kenohon, Gunung Sari, Long Lalung, Ritan Baru, Muara Ritan, dan Beluksen.

Sayangnya tuntutan hak ini sulit dipastikan karena tidak ada peta definitif mengenai batas-batas desa sekarang. Kawasan konservasi dan

bantaran sungai luasnya mencapai 20% dari lahan yang dikuasai perusahaan dan di bawah manajemen departemen konservasi yang dinamakan Rea Kon (dari kata "konservasi" dalam bahasa Indonesia). CPO dan CPKO yang dihasilkan oleh pabrik group REA Kaltim dikirim melalui jalan tangki dekat dengan tempat penimbunan di Sungai Belayan dan dari hilir menuju bangunan tongkang. Group ini memiliki terminal pengapalan sendiri di Sungai Mahakam (Sungai Belayan merupakan anak sungai Mahakam) hilir dari pelabuhan Samarinda. CPO dan CPKO disimpan di sini sebelum dikirim ke pembeli tujuan internasional atau ke tempat lain di kepulauan Indonesia. PT REA Kaltim Plantations Lokasi desa-desa dalam PT REA Kaltim Plantations berdasarkan *coordinate* GPS dalam laporan audit CUC39 PT Rea Kaltim Plantations menerima sertifikasi RSPO tahun 2011, setelah prapenilaian pada bulan Desember 2010 dan penilaian sertifikasi pada tanggal 28 Februari sampai dengan 4 Maret 2011. Auditor merekomendasikan sertifikasi RSPO dengan pertimbangan bahwa PT Rea Kaltim Plantations 'membuktikan kepatuhan seluruh kriteria RSPO dimana seluruh ketidak-patuhan akan menghasilkan kendala ketidak-patuhan mayor dan mungkin menghalangi keputusan sertifikasi'.

3. Wilayah Studi

Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi kedua paling luas di Indonesia dan berada di bagian timur pulau Kalimantan. Kalimantan Timur terdiri dari empat kota administrasi, sembilan kabupaten, 122 kecamatan, dan 1347 desa/kampung. Pada tahun 2005 jumlah penduduk Kalimantan Timur adalah 2,8 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 11,22 jiwa per

kilometer persegi, dengan penduduk tersebar merata antara wilayah pantai dan pedalaman. Terdapat enam ekosistem yang ditemukan dalam bentang alam di Kalimantan Timur yaitu rawa gambut, hutan bakau, hutan kerangas, dataran hutan meranti dan hutan basah. Terdapat 162 sungai mengalir di Kalimantan Timur dengan luas 241.000 km persegi dan jarak 12.060 km, menghubungkan 17 danau dan bersumber dari pegunungan yang berada di wilayah perbatasan dengan Kalimantan, Sarawak dan Sabah. Provinsi Kalimantan Timur merupakan rumah hunian yang kaya akan keanekaragaman hayati, lebih dari 3.000 jenis pohon, 1.000 jenis pakis, 133 spesies mamalia dan sebelas jenis primata ditemui. Sekitar 60% mamalia asal Kalimantan ditemukan di Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur terus menjadi sasaran investasi domestik dan nasional karena sumber daya alamnya yang melimpah. Dalam sektor kehutanan sekitar 8,1 juta ha dikuasai oleh perusahaan kayu (93 HPH dan 25 HTI). Sektor pertambangan terdapat sekitar 67 kesepakatan pertambangan batu bara (PKP2B) yang telah ditanda-tangani dan lebih dari 500 izin pertambangan dikeluarkan di seluruh provinsi untuk berbagai perusahaan seluas 3,08 juta ha. Di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri dimana PT REA Kaltim Plantations berada, minyak bumi, gas alam dan tambang batu bara merupakan 77% sumber ekonomi lokal, dengan nilai investasi asing mencapai \$68.000.000 tahun 2010.

Pembangunan perkebunan dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan– KBNK di Kalimantan Timur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kalimantan Timur meliputi lahan seluas 6.520.622,73 ha. Terdapat 1,2 juta

ha lahan telah dialokasikan untuk izin usaha perkebunan skala besar perkebunan kelapa sawit, dimana 392.605,22 ha telah mengantongi izin HGU. Dalam 7 tahun terakhir perluasan perkebunan meningkat 30% dan akan terus dibuka hingga mencapai 4,7 juta ha pada tahun 2025. Seluruh perkebunan sawit skala besar dikuasai dan dijalankan oleh sekitar 330 perusahaan. Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 dan oleh BPS Kalimantan Timur 2011, total luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai tahun 2010 adalah 123.673 ha, dimana 109.460 ha dijalankan oleh perusahaan swasta. Pada tahun 2010 total luas kebun plasma di seluruh Kabupaten Kutai adalah 14.188 ha.

Berbagai dampak negatif sosial dan lingkungan disebabkan oleh lemahnya aturan pembebasan lahan untuk eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Timur. Ini termasuk laju kerusakan hutan yang mencapai rata-rata 300.000 ha per tahun, semakin sering banjir dan tanah longsor serta pencemaran air dan udara yang serius. Sebagian besar hutan Kutai Kartanegara rusak parah akibat kebakaran besar yang melanda hutan tahun 1982-1983 dan 1997-1998. Pembukaan lahan ilegal untuk tujuan pembalakan kayu mengakibatkan pencabutan 146 izin lokasi seluas 2,5 juta ha oleh pemerintah provinsi pada tahun 2002. Konflik lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan diperburuk dengan konflik horizontal antar dan di dalam masyarakat akibat pembagian lahan yang tidak adil kepada investor swasta tanpa pengakuan hak-hak masyarakat lokal atas tanah dan menggunakan tanah di bawah peraturan daerah.

Kabupaten Kutai Kartanegara, lokasi dimana konsesi PT REA Kaltim Plantations berada, merupakan salah satu kabupaten yang paling kaya di Kalimantan Timur dengan pendapatan daerah tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp. 6,5 triliun. Luas tanah Kabupaten Kutai adalah 2.7263,10 km² dan dibagi menjadi 18 kecamatan dan 225 desa dengan jumlah penduduk 626.286 jiwa. Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan dengan Kabupaten Malinau di sebelah Utara, dengan Kabupaten Penajam Paser Utara di bagian Selatan, dengan Kutai Barat di bagian Barat dan dengan Kota Bontang dan Selat Makassar di sebelah Timur. Dari 1970an hingga sekarang sebagian besar hasil kayu hutan yang dihasilkan di Kalimantan berasal dari Kutai Kartanegara (khususnya jenis kayu Meranti, Keruing dan Agathis) dan dikirim melalui Sungai Mahakam. Walaupun kaya akan sumber daya alam, terutama lahan hutan, cadangan emas dan batu bara, pendapatan dari pengurusan sumber daya alam tersebut belum dibagi dengan adil merata oleh pemerintah pusat dan tingkat kemiskinan penduduk lokal tinggi, diperparah dengan terbatasnya pembangunan infrastruktur, bahkan dalam kasus kemiskinan di Kutai Kartanegara, dimana banyak infrastruktur fisik dan fasilitas dibangun di wilayah asli Kabupaten Kutai sebelumnya.

4. Sejarah Penduduk dan Kepemilikan Tanah

Kalimantan Timur merupakan lokasi dimana kerajaan Hindu tertua di Indonesia berada, Kutai, yang sejarahnya dapat dibagi menjadi dua masa: masa awal Kutai Martadipura (kira-kira 350–400 SM) dan kemudian masa Kutai Kartanegara (mulai kira-kira 1300 M). Keberadaan kerajaan

Kutai Martadipura dibuktikan dengan prasasti tujuh tonggak batu, atau yūpa ("tempat pengorbanan"), yang ditemukan di Kutai, Muara Kaman, dekat dengan Sungai Mahakam, yang mengandung prasasti dalam aksara Palawa. Kutai kemudian menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit pada akhir abad 13 sampai 16.

Kesultanan Kutai Kartanegara dibangun di kawasan sekitar Tepian Batu atau Kutai Lama, kota yang kemudian dikenal sebagai Tenggarong di Sungai Mahakam di hulu Samarinda yang merupakan kota modern provinsi Kalimantan Timur. Kutai Kartanegara kemudian digabung dengan Kutai Martadipura sebagai kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Serangan Belanda terhadap Makassar di Pulau Sulawesi tahun 1667, mengakibatkan runtuhnya kerajaan Bugis di Gowa dan memicu pelarian masyarakat Bugis ke Kutai dimana Sultan Kutai mengizinkan mereka menetap di Kampung Melantai yang kemudian hari berkembang besar dan masuk ke dalam kota Samarinda. Kedatangan masyarakat Bugis juga menandai dimulainya perluasan pengaruh Islam di Kalimantan Timur yang kemudian dikuasai pertama kali oleh penguasa Islam pada tahun 1732.

Pengunjung pertama Belanda ke Kesultanan Kutai dilaporkan tiba tahun 1635 dan menandatangani perjanjian perdagangan dengan Sultan Kutai, meskipun kemudian sejak 1844 Kesultanan Kutai benar-benar dianggap sebagai wilayah perlindungan Belanda di bawah Divisi Belanda Borneo Selatan dan Timur (Borneo's Zuider- en Ooster-Afdeling). Hampir satu abad kemudian, dengan kekuasaan Jepang, Kesultanan Kutai kemudian diakui sebagai 'Kerajaan Kooti', tunduk pada Kekaisaran Jepang.

Tiga tahun kemudian pada 1945, Kutai bergabung dengan federasi Kalimantan Timur dan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Pada tahun 1959, Daerah Istimewa Kutai, diwakili oleh Sultan A.M. Parikesit, dibubarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959, kemudian daerah kekuasaan Kesultanan Kutai dibagi menjadi tiga daerah tingkat II Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Kutai Timur yang menjadi kabupaten bulan November 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.

Penduduk Kalimantan Timur sangat majemuk dan merupakan campuran dari masyarakat adat Dayak (termasuk Dayak Kenyah dan Dayak Tunjung) dan Kutai, dan kelompok suku lainnya seperti Jawa, Tionghoa, Banjar, Bugis dan Melayu. Di wilayah Kutai Kartanegara, sekitar tiga per empat penduduk yang mendiami wilayah pedesaan bermukim dekat sungai Mahakam dan anak-anak sungai Mahakam yang menjadi pusat jalur transportasi dan kegiatan ekonomi. Hampir sekitar 80 bahasa dan dialek yang menjadi bahasa sehari-hari di Kalimantan Timur. Bahasa tradisional di daerah ini disebut sebagai Melayu Tanggarong Kutai, yang merupakan keluarga bahasa Austronesia dan bagian dari cabang bahasa Sunda-Sulawesi, bersama dengan bahasa Melayu dan Iban serta bahasa Bugis. Bahasa daerah yang juga dipakai di daerah pedalaman termasuk Kenyah dan Kayan. Suku Dayak, yang sebagian besar sekarang beragama Kristen, cenderung tinggal di kampung-kampung yang dekat dengan atau di dalam kawasan hutan, dan sangat bergantung pada pertanian gilir balik dan mengumpulkan hasil-hasil dari hutan. Suku Dayak di Kalimantan Timur

dikelompokkan ke dalam sembilan bagian kelompok: Kenyah, Bahaus (dibagi lagi dalam Busang, Bahau Sas dan Bahau Modang), Kayan, Benuaq, Tunjung, Ohen, Bentian, Punan dan Lon Dayeu. Wilayah perkotaan dan pesisir pedesaan Kalimantan Timur didiami oleh orang Kutai, Bugis, Banjar, Tionghoa, Jawa, Bali, Batak, Minangkabau, Madura dan juga suku-suku pendatang lainnya. Kutai, penduduk asli Kesultanan Kutai sebagian besar adalah Muslim dan memiliki kecenderungan menguasai birokrasi setempat dari tingkat provinsi sampai kabupaten dan kadang-kadang sampai tingkat desa bahkan di daerah yang penduduknya mayoritas Dayak. Bugis dari Sulawesi Selatan adalah kelompok suku kedua terbesar di Kalimantan Timur (setelah Jawa) dan secara sejarah menguasai kegiatan ekonomi di wilayah Kutai khususnya perdagangan. Di saat Dayak dan Kutai diakui secara resmi sebagai orang pribumi Kalimantan Timur, banyak kelompok suku lain yang sudah hidup menyatu di wilayah tersebut sejak masa penjajahan Belanda. Di bawah Kesultanan Kutai, misalnya Dayak, Bugis dan Tionghoa aktif di dalam pemerintahan, dan pembagian kekuasaan multi-etnis seperti ini berlangsung hingga masa penjajahan Belanda. Namun, beberapa dekade kemudian program transmigrasi pemerintah, yang juga dianggap penduduk setempat sebagai proses 'Jawanisasi' di wilayah ini menyebabkan terjadinya segregasi suku dan persaingan antar-suku atas tanah, sumber daya alam, dan perwakilan politik dan suara. Penduduk suku Dayak pedesaan dan pedalaman kawasan hutan, mengalami kekalahan besar dari orang Kutai dan pendatang baru seperti Bugis, Jawa dan suku lainnya. Beberapa ketegangan antar suku dilaporkan

pernah terjadi di dalam konsesi, khususnya berhubungan dengan hak tanah, namun karena isu yang cukup sensitif dan waktu kunjungan lapangan yang singkat saat kegiatan observasi lapangan sehingga menjadi sulit memastikan hal ini di lapangan. Beberapa diskusi dengan anggota masyarakat mengungkapkan ada pembedaan yang dilakukan oleh orang Kutai antar sesama mereka dengan kelompok suku lainnya seperti Dayak, khususnya terkait agama dan budaya seperti praktek pemakaman dan tempat keramat.

Tanah dimiliki secara kolektif oleh orang Dayak dan diwariskan dengan adil kepada anak keturunan. Pertanian tebang dan bakar dijalankan begitu juga menanam padi, didukung dengan kegiatan mengumpulkan hasil-hasil hutan dan mencari ikan di sungai untuk makan dan dijual. Membuka kawasan hutan alam primer yang belum dimiliki dan dikerjakan memberikan hak pakai kepada pembuka lahan hutan pertama, tetapi tanah bisa berpindah-tangan secara adat dari pemilik hak kepada orang lain yang biasanya dengan imbalan untuk 'bayaran setimpal' atau 'tali asih'. Pembukaan lahan dalam kawasan hutan memerlukan izin dari pemimpin adat khususnya apabila dikerjakan dekat dengan makam kuburan leluhur dan tempat keramat.

B. Pembahasan

1. Latar Belakang Konflik Massal Yang Beraspek Pidana Yang Terjadi Antara PT. Rea Kaltim Plantation Dan Masyarakat Sekitarnya

Sejak kehadiran perusahaan kayu dan perkebunan kelapa sawit tanah semakin banyak dikuasai oleh perorangan, bahkan antar suku Dayak dimana ada anggota suku menjual bagian tanah-tanah mereka kepada

para pendatang dari wilayah lain Indonesia. Kendati demikian, individualisasi kepemilikan tanah tidak dibarengi dengan pengakuan formal terhadap hak-hak kepemilikan tersebut. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki Surat Pernyataan Tanah atau SPT, apalagi sertifikat tanah.

Tidak adanya pengakuan terhadap hak adat atas tanah dalam hukum ditunjukkan oleh beberapa anggota masyarakat sebagai akar penyebab disintegrasi sistem kepemilikan tanah bersama/komunal yang secara tradisi dijalankan, dan pemberian izin konsesi kepada perusahaan sektor swasta (kayu dan kelapa sawit) tanpa konsultasi dengan masyarakat, atau persetujuan dari masyarakat yang telah memiliki, mendiami dan menggunakan tanah-tanah tersebut untuk sumber penghidupan mereka.

Pendekatan pemerintah adalah tidak cukup berpihak pada rakyat apabila berhubungan dengan proyek-proyek investasi tersebut. Pemahaman kami adalah bahwa baik perusahaan kayu maupun perkebunan kelapa sawit yang ada di desa-desa kami karena persetujuan pemerintah. Tetapi persetujuan pemerintah tidak mencerminkan atau PT REA Kaltim Plantations tidak memperhitungkan pertimbangan hak-hak tanah masyarakat.² Mereka sungguh tidak tahu kalau masih punya tanah adat lagi sekarang. Tidak ada tanah dimana campur tangan negara tidak dirasakan, atau dimana mereka memiliki kewenangan penuh dalam mengelola tanah kami bersama. Menurut masyarakat sekitar menyebutkan bahwa banyak orang Dayak telah menjual tanah kepada pendatang seperti

² Wawancara kepala desa Kembang Jenggut, ditegaskan ulang oleh kepala desa Perdana dan anggota masyarakat lainnya Tanggal 1 Februari 2015.

orang Jawa. Tetapi seharusnya masyarakat adat tidak menjual tanah, karena kalau itu terjadi mereka benar-benar tidak akan memiliki apa-apa lagi yang tersisa.

Disintegrasi bertahap dari hukum adat dan kebiasaan musyawarah, atau konsultasi desa, sebagai alat pengambilan keputusan dan pengambilan kesepakatan bersama, juga dikemukakan sebagai salah satu faktor penyebab hilangnya tanah-tanah adat oleh masyarakat. masyarakat menyesal tidak bisa lagi menggunakan hukum adat untuk berhadapan dengan perusahaan dan menuntut haknya atas tanah berdasarkan hukum adat. mereka tidak punya kesempatan untuk menulis hukum adat yang seharusnya dilakukan, seandainya sudah dilakukan, pasti mereka dapat menggunakan hukum adat sebagai pembenaran untuk hak atas tanah dalam berhadapan dengan perusahaan. Seharusnya mereka diberikan kesempatan untuk menggunakan hukum adat dalam mempertahankan hak-haknya.

Operasional PT REA Kaltim Plantations PT REA Kaltim Plantations berada di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara (sekitar 138 km barat ibu kota Kalimantan Timur, Samarinda), dan sebagian kecil berada di Kecamatan Tabang. Terdapat tiga ketidakpatuhan minor dan dua observasi ditemukan khususnya berkaitan dengan kriteria status hukum PT Rea Kaltim Plantations mendapatkan izin lokasi tahun 1991 dan saat ini REA Group menguasai cadangan lahan hampir 98.000 ha. Group ini mendapatkan lima sertifikat HGU yakni: 1 No 01/95, 6 September 1995 (Perdana), 2 No 02/95, 6 September 1995 (Sentekan), 3 No 03/95, 6

September 1995 (Lestari), 4 No 01/98, 10 Januari 1998 (Damai dan Berkat), 5 No 02/99, 26 Agustus 1999 (Cakra) Pandangan Masyarakat Konsorsium NGO mengunjungi lima desa (Hambau, Kembang Jenggut, Muai, Perdana dan Pulau Pinang) di Kecamatan Kembang Jenggut dalam konsesi PT Rea Kaltim Plantations. Desa-desa ini berada sepanjang pinggir Sungai Belayan dan anak-anak Sungai Sentekan dan Lurah. Selama kunjungan, konsorsium NGO mewawancarai anggota masyarakat termasuk kepala desa, wakil partai politik dan ketua RT.

Kunjungan tidak dapat dilakukan ke seluruh desa dalam konsesi perusahaan karena kendala waktu dan kondisi jalan yang buruk saat musim hujan. Berkenaan dengan tahap awal perusahaan menjalankan kegiatan awal tahun 1990, muncul informasi yang disampaikan kepada masyarakat hanya sebatas pernyataan dari perusahaan mengenai niat perusahaan PT REA Kaltim Plantations untuk membangun perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut, dan mengundang beberapa wakil (tidak semua) desa bergabung dalam pola Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan kemudian pola plasma tahun 2007. Beberapa di antara anggota masyarakat membenarkan bahwa perusahaan kemudian sejak itu langsung membangun infrastruktur desa (misalnya pengadaan generator, air minum, membangun klinik, masjid, gereja dan sekolah, membangun dan memelihara jalan) yang disyukuri masyarakat.

Beberapa kepala desa yang diwawancarai menyimpan salinan peta, kesepakatan plasma dan bukti kompensasi dari perusahaan tetapi mayoritas anggota masyarakat tidak memiliki atau bahkan melihat salinan

dokumen-dokumen tersebut. Dokumen *HCVA* (penilaian konservasi tinggi) dan *SIA* (kajian dampak sosial) tidak dipegang oleh anggota-anggota masyarakat yang diwawancarai. Ada keluhan penting di antara sejumlah masalah bahwa perusahaan cenderung percaya kepada kepala desa dan tim desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas tetapi sesungguhnya tidak dilaksanakan. Di saat pandangan masyarakat tidak dapat digeneralisasi, seluruh temuan menunjukkan bahwa masyarakat tidak menolak keberadaan PT Rea Kaltim Plantations dan tidak merasa bahwa akses mereka atas tanah dan sumber daya alam telah terdampak parah oleh aktifitas perusahaan. Keluhan-keluhan utama yang disampaikan masyarakat adalah tidak adanya pemenuhan plasma yang dijanjikan, kompensasi tidak dibayar atas tanah yang digusur, dan kurang informasi dari perusahaan mengenai kegiatan perusahaan dan hak-hak masyarakat. Serangkaian protes terjadi di beberapa tempat akibat tidak dipenuhinya plasma dan ganti rugi pemblokiran jalan selama 25 hari baru saja berakhir pada hari pertama penilaian tim observasi lapangan. Dari beberapa pernyataan masyarakat, jelas bahwa proses untuk memenuhi hak-hak masyarakat di tahap awal proses sama sekali tidak ada, namun sejak itu pula inisiatif telah dilaksanakan oleh perusahaan untuk memberi manfaat bagi masyarakat setempat dalam konsesi perusahaan. Masyarakat lokal mengungkapkan harapan agar masyarakat mendapatkan manfaat dari keberadaan perusahaan khususnya melalui pemenuhan kebun plasma. Mereka mengusulkan agar jalur komunikasi bisa diperbaiki (selama ini hanya menggantungkan komunikasi melalui kepala desa dan tim desa)

sebagai kunci wilayah perbaikan atas hubungan antara masyarakat dan perusahaan.

Dalam bahasa bernada kurang positif terungkap cerita, pada umumnya sosialisasi dan komunikasi merata tidak dilakukan dalam seluruh desa di dalam konsesi perusahaan menyebabkan kebingungan dan kekecewaan bagi mereka yang mendapatkan sedikit peluang dan sedikit bantuan pembangunan. di Tahun-Tahun Awal Pada tahun 1992– 1993, PT Rea Kaltim Plantations mulai mencari lahan yang sesuai untuk budidaya sawit bersamaan dengan mendata para pemilik lahan dan penggarap lahan. Proses ini dilaksanakan secara langsung dan melibatkan badan-badan pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Tim pembebasan lahan dan tim negosiasi dibentuk di setiap desa oleh pemerintahan desa agar membantu proses pendataan dan penyerahan lahan, serta menetapkan batas-batas dan mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan tanah seperti SPT dan sertifikat tanah. Bukti sejarah masa Orde Baru menyiratkan bahwa peran pemerintah dalam pendataan tanah sangat dominan, dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, baru setelah itu tingkat masyarakat dan perorangan dilibatkan. Sosialisasi hanya dilaksanakan satu kali pada tahun 1992-1993, setelah itu perusahaan melakukan pengukuran lahan dan mengurus lahan-lahan masyarakat disertai dengan pembayaran ganti rugi lahan, dan kadang-kadang juga tanam tumbuh. Sosialisasi saat itu merupakan proses perusahaan menjelaskan proyek pengembangan perkebunan kelapa sawit serta menyampaikan janji-janji untuk masyarakat, seperti membuka lahan

garapan, kesempatan kerja, pembangunan dan pemberdayaan desa, dan lain-lain. Kesepakatan dibuat, dan catatan pertemuan sosialisasi diberikan kepada kepala desa yang kemudian bertanggung jawab membagikan dokumen-dokumen tersebut kepada masyarakat luas.

PT REA Kaltim Plantations melakukan pembayaran kompensasi (tali asih) dibantu oleh pejabat pemerintah sesuai dengan SOP perusahaan mengenai pembayaran kompensasi dan dibayar langsung kepada kepala desa sebagai perwakilan desa, yang bertanggung jawab membagikan uang kepada kepala keluarga. Laporan-laporan resmi disimpan seperti pembayaran kompensasi, disertai foto-foto dan disyahkan melalui rapat-rapat jajaran muspika atau musyawarah pimpinan kecamatan. Desa Perdana, yang dihuni oleh 439 kepala keluarga (1.360 jiwa) dari beberapa kelompok suku Jawa, Bugis, Kutai, Toraja, Tionghos dan Flores, merupakan desa pertama yang dihubungi oleh PT Rea Kaltim Plantations saat pertama tiba di daerah ini untuk membuka perkebunan kelapa sawit pada tahun 1991. Penggusuran lahan mulai di Perdana pada awal tahun 1993–1994. Lokasi pembibitan dibangun di lahan Desa Perdana. Meskipun begitu, perluasan lahan 3.946 ha sekarang ini dilakukan tanpa konsultasi atau komunikasi dengan masyarakat. Bahkan waktu itu, mereka tidak yakin bagaimana PT. Rea mendapatkan tanah masyarakat. Mereka mengetahui bahwa mereka datang dan memberitahu masyarakat bahwa tanah ini akan menjadi HGU mereka. Saat itu masa Orde Baru, sehingga pemerintah membuat banyak keputusan atas nama masyarakat. Pembibitan PT Rea Kaltim Plantations dibangun atas tanah dan ladang milik masyarakat.

Setelah itu perusahaan memperluas lahan kebun ke dalam lahan hutan di dalam tanah adat masyarakat sekitar.

Kepala Desa bernama Pak Kasmani Di desa Hambau, menerangkan bahwa anggota masyarakat diwawancarai tidak mengetahui jika mereka turut serta dalam aktifitas sosialisasi oleh PT Rea Kaltim Plantations pada tahun 1992 ketika mereka pertama kali tiba di wilayah masyarakat. Hubungan pertama kali terbangun dengan perusahaan adalah pada tahun 2006-2007, ketika PT Rea mulai menggusur lahan di dalam wilayah desa, dalam beberapa kasus bahkan tanpa sama sekali pemberitahuan terlebih dahulu. Penggusuran lahan dilakukan sampai bibir Sungai Hiran, Kenohon, Lurah dan Hapai. PT Rea mengambil tanah yang ditanami karet. Pohon karet sudah tinggi sekitar 300 pokok dan dirusak semua. Kepala Desa terlalu takut melapor karena tahu anggota polisi Brimob ada dimana-mana saat itu, sehingga tidak melaporkan kasus ini kepada perusahaan, atau siapapun, karena bukti pohon karet miliknya telah habis dirusak. Dijelaskan oleh Pak Ridwan. Menurut beberapa di antara mereka menemukan kalau tanah kami sudah digusur pagi hari saat kami pergi ke ladang padi dan kebun. Bagi kami, perampasan atas tanah kami tanpa pemberitahuan merupakan masalah yang hingga kini belum pernah diselesaikan. (anggota masyarakat) Menurut perusahaan sosialisasi tidak dilaksanakan di desa Hambau karena wilayah tersebut tidak menjadi bagian dari HGU perusahaan.

Pemetaan yang dilakukan oleh tim survei Muspika menghasilkan peta definitif akan menyimpulkan desa mana saja yang ada hak atas tanah

di dalam HGU PT REA. Perusahaan telah mengatakan bahwa jika peta menunjukkan ada tanah desa Hambau di dalam HGU perusahaan kemudian mereka perlu menyesuaikan alokasi plasma. Di Kembang Jenggut, satu desa di sebelah tenggara konsesi PT Rea dihuni sekitar 986 kepala keluarga, sekitar 500 ha lahan mereka dilaporkan diambil oleh PT Rea Kaltim Plantations tanpa peringatan atau konsultasi terlebih dahulu. Pada tahun 2006-2007, ganti rugi diberikan atas lahan yang digusur seharga Rp. 600.000 per hektar tetapi masyarakat protes karna tidak termasuk tanam-tumbuh dan buah-buahan yang turut tergusur dalam tanah yang diambil perusahaan. Wawancara dengan ketua RT 1 Philipus Njang, 68 tahun, dari desa lain yaitu Pulau Pinang, yang umumnya dihuni oleh orang Dayak Tunjung, menegaskan bahwa sedikit sekali, kalau pun ada, kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada tahun 1990an. Di Muaim, sebuah desa yang dihuni oleh sekitar 1000 kepala keluarga dari kelompok suku Bugis, Kutai, dan Dayak, anggota masyarakat melaporkan bahwa utusan perusahaan yang pertama mengunjungi desa meminta masyarakat untuk menjual tanah mereka dan imbalannya mereka mendapat plasma. Mereka mengambil tujuh hektar PT REA Kaltim Plantations tanah keluarga saya tanpa kompensasi. Sebelum itu, kami bebas menggarap tanah kami untuk ladang padi dan kebun. Bagaimana kami bisa mengolah tanah-tanah adat kami jika diambil oleh PT Rea menurut Pak Wahidu di Kembang Jenggut, kepala desa, Pak Aslan, membenarkan bahwa persetujuan masyarakat tidak diminta saat itu. Perusahaan hanya mengumumkan niatnya kepada masyarakat dan apa saja manfaat yang didapatkan masyarakat setempat

dari pembangunan perkebunan kelapa sawit. Tidak satupun di antara kami masyarakat yang sadar akan peta atau survei sosial partisipatif dilakukan saat itu.

Tidak adanya identifikasi batas-batas konsesi perusahaan juga disebut sebagai penyebab penting konflik hak atas tanah (serta mereka yang memanfaatkan kesempatan) oleh masyarakat dan antar masyarakat. Tanpa peta, kami seperti buta. Menurut Pak Ridwan yang menyebutkan bahwa hak-hak adat tidak pernah dimasukkan dalam bentuk peta. Pak Aslan Salah satu tuntutan kami adalah pengukuran ulang dan penetapan batas-batas tanah adat dan konsesi perusahaan. Pak Aslan berpendapat bahwa sungguh tidak tau dimana batas-batas konsesi perusahaan, jadi kami tidak tahu berapa banyak tanah kami yang masuk ke dalam konsesi perusahaan. Sampai saat ini, kelihatannya banyak masyarakat tidak sadar status hukum kegiatan perusahaan termasuk lokasi dan masa berlaku 5 buah HGU yang diperoleh PT Rea Kaltim Plantations.

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui jelas sifat kegiatan PT Rea Kaltim, struktur organisasinya, dan aturan kegiatan perusahaan di tanah-tanah adat mereka. Banyak yang menekankan bahwa akan lebih baik jika pemberian izin dilakukan dengan kerjasama, atau paling tidak berkonsultasi dengan masyarakat setempat yang akan kena dampak. Menanggapi hal ini perusahaan mengatakan bahwa seluruh pemberian lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui proses AMDAL dan proses Panitia B yang juga dilakukan sebelum HGU diperoleh, yang merupakan pengesahan masyarakat atas proyek-proyek yang diinginkan.

Meskipun begitu, dilaporkan bahwa banyak tetua-tetua desa telah meninggal atau pindah ke kota membawa pergi pemahaman dan informasi mengenai pembangunan tersebut. Kompensasi Banyak anggota masyarakat di Hambau yang belum menerima ganti rugi atas hilangnya tanah mereka karena diambil perusahaan empat atau lima tahun yang lalu dan mereka tidak sadar apakah perusahaan memiliki SOP untuk membayar kompensasi. Mereka juga tidak yakin kepada siapa mereka harus menyampaikan tuntutan mereka karena lembaga pemerintah yang diminta telah gagal menanggapi. Pemerintah provinsi menutup telinga mereka atas tuntutan kami. Tidak ada juga investigasi dilakukan di lapangan untuk membuktikan tuntutan kami. (anggota masyarakat) Saat ditulisnya penulisan laporan ini, masyarakat dari Kembang Jenggut juga sedang dalam penyampaian keberatan mereka karena tidak adanya kompensasi atas tanah dan tanam tumbuh yang digusur perusahaan tujuh tahun yang lalu. Mereka menuntut Rp. 15 miliar dari perusahaan, setara dengan jumlah lahan yang diambil tujuh tahun yang lalu. Jumlah tuntutan kemudian dikurangi menjadi Rp. 10 miliar. Di Desa Muai, ganti rugi dan pemenuhan plasma merupakan tuntutan utama dari mereka yang keberatan. Menurut warga mereka dijanjikan Rp. 3,5 juta oleh perusahaan secara lisan tetapi tidak pernah diberikan. Saat ini warga menuntut Rp. 15 juta yang mereka sebut setara dengan nilai tanah mereka yang hilang. Selain itu, ada beberapa anggota masyarakat menyampaikan bahwa kompensasi sudah dibayar oleh perusahaan tetapi mereka tidak pernah melihat bukti pembayaran atau menerima uangnya. Mungkin tim desa atau koperasi ada

menyimpan bukti pembayaran, masalahnya kami tidak tahu, dan kami PT REA Kaltim Plantations tidak tahu dimana uang itu. (Pak Wahidu) Tim survei Muspika saat ini sedang bekerja menentukan mana tuntutan ganti rugi lahan yang benar dan mana yang palsu.

Pola Plasma Menurut pegawai perusahaan yang diwawancarai, pola plasma yang diterapkan perusahaan adalah Kemitraan Manajemen Satu Atap, untuk itu perusahaan membentuk Departemen Plasma. Tanggung jawab departemen plasma adalah menyediakan pelatihan untuk anggota-anggota plasma melalui dua koperasi: Kahat Bersatu (untuk Pulau Pinang, Perdana dan Bukit Layang) dan Etam Bersatu (untuk Kelekat). Menurut audit CUC, plasma dikelola dan dikembangkan oleh sebuah tim plasma yang ditunjuk oleh perusahaan. Plasma pertama yang ditanam tahun 2009 dan rencana mulai berbuah tahun 2012. Target perusahaan adalah membangun 4.700 ha setara dengan 20% luas HGU. Wawancara di beberapa desa mengungkapkan bahwa banyak yang mengharapkan manfaat dari kehadiran PT Rea melalui pola plasma. Beberapa desa ditawarkan oleh perusahaan pada tahun 2007 dan 2008 serta memiliki kesepakatan yang ditanda-tangani dengan PT Rea Kaltim Plantations (seperti Perdana, Kelekat dan Pulau Pinang). Tetapi masyarakat lain mengeluh bahwa mereka berinisiatif untuk mendekati perusahaan dan meminta plasma, karena perusahaan menjelaskan kepada mereka mengenai manfaat dari aktifitas mereka melalui pola plasma. Di Hambau, contohnya, anggota masyarakat bingung mengapa plasma tidak ditawarkan kepada mereka oleh perusahaan, dan mengapa masyarakat harus meminta

dari perusahaan setelah menyadari apa isi plasma dari jalur informasi mereka sendiri. Tidak ada aktivitas sosialisasi dilakukan dan banyak anggota masyarakat mengetahui tentang plasma tahun 2012 dengan cara mereka sendiri (termasuk dari sumber hukum seperti Permentan Nomor 26 Tahun 2007). PT Rea mulai bekerja tahun 1994, tetapi plasma baru dimulai tahun ini, dan tidak di desa kami. Kami sudah ada plasma dengan PT PTS (perusahaan sawit yang berdekatan) dan mereka jauh lebih baru, sehingga kami tidak mengerti, bagaimana kami dapat mencari informasi dengan cara kami sendiri dan menuntut hak kami untuk dipenuhi. Menurut Pak Ridwan mengenai plasma, perusahaan mengatakan bahwa di bawah peraturan yang berlaku sebelum 2007, mereka tidak wajib menyediakan kebun plasma kepada warga desa pemilik lahan dalam konsesi mereka karena daerah tersebut dibangun sebelum 2007. Meskipun begitu, perusahaan melaporkan bahwa mereka telah menawarkan kepada masyarakat akses atas tanah dan peluang untuk terlibat dalam pola kemitraan yang berbeda melalui program PPMD mereka. Meskipun begitu hanya sedikit yang menerima tawaran ini. PT REA Kaltim Plantations. Kepala desa Kembang Jenggut menunjukkan kesepakatan antara PT REA Kaltim Plantations dan Kembang Jenggut untuk pemenuhan plasma atau Carlo Nainggolan Informasi lengkap mengenai plasma disampaikan kepada Kembang Jenggut bulan Juni 2012 Carlo Nainggolan Seperti di desa lain, Kepala desa Kembang Jenggut menyatakan bahwa masyarakat mendekati perusahaan untuk meminta kebun plasma, setelah mengetahui soal plasma ini dari desa lain yang juga sedang menyampaikan keberatan terhadap perusahaan

karena hingga kini gagal melaksanakan plasma. Situasi justru terbalik. Seharusnya perusahaan yang mendekati kami karena ini adalah tanggung jawab mereka. (Pak Aslan) Menurut kepala desa, 500 ha plasma, dalam bentuk kesepakatan kemitraan, dijanjikan kepada masyarakat tahun 2006, tetapi sampai sekarang belum dipenuhi. Dalam kesepakatan itu, masyarakat akan diberikan bibit, pupuk, pestisida dan lain-lain untuk menanam kelapa sawit.

Pemeriksaan atas dua kesepakatan dengan Kembang Jenggut, dilakukan oleh kepala desa, menunjukkan bahwa kesepakatan plasma tidak memiliki kekuatan hukum karena sejauh ini perusahaan hanya 'berjanji (secara lisan) untuk membantu masyarakat Kembang Jenggut dalam perkebunan plasma. Komitmen yang sama dibuat dalam dua kesepakatan (17 April 2006 dan 9 Maret 2007). Uraian lengkap mengenai sifat pola plasma (termasuk masa berjalan, lokasi plasma, status tanah setelah HGU berakhir) sampai sekarang tidak dimasukkan dalam dua kesepakatan tersebut, dan kelihatannya masyarakat salah menafsirkan dokumendokumen tersebut sebagai kontrak plasma formal, dan mereka jadikan sebagai dasar tuntutan mereka. Pemberian informasi mengenai plasma dilakukan tahun 2012, menurut kepala desa, dan dibenarkan oleh sebuah dokumen uraian sifat dan aturan plasma manajemen satu atap, tertanggal 28 Juni 2012. Kepala desa tidak sadar dimana lahan plasma akan ditempatkan; sebuah peta telah dibuat setelah proses identifikasi lahan tahun 2012 tetapi beliau tidak punya salinannya. Di beberapa desa (khususnya Kembang Jenggut dan Muai), kelihatannya sosialisasi kolektif

dengan masyarakat dilakukan sekitar tahun 2007 ketika perusahaan memperkenalkan pola plasma. Kendati demikian, sejak saat itu, sangat sedikit sekali konsultasi dan hubungan dijalankan. Sosialisasi terjadi pada tahap awal, sangat singkat, tetapi kami tidak tahu apa yang terjadi sejak itu. Itu bukan proses yang berulang tuntas/interatif. Pak Wahidu menyebutkan bahwa Situasi di desa Pulau Pinang jauh lebih menggembirakan dalam hal pemenuhan plasma. Menurut seorang warga masyarakat (yang juga merupakan ketua RT1), sebagian besar masyarakat menerima 2 ha, serta dibantu dalam bentuk bantuan bibit dan pelatihan. MoU plasma disimpan oleh warga masyarakat Pulau Pinang dan telah ditanda-tangani oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur atau BPD Kaltim sebagai peminjam dan lembaga keuangan pembangunan plasma dan koperasi sebagai perwakilan (badan hukum) petani, serta perusahaan sebagai penjamin (avalis). MoU jelas menyatakan biaya pembangunan setiap hektar tanah Rp. 39 juta (setiap tahun bervariasi) karena fluktuasi biaya pembukaan lahan, pembelian bibit, pemeliharaan, pupuk, pestisida dan lain-lain. Di bawah MoU, petani anggota wajib menyelesaikan hutang mereka dengan cicilan angsuran bulanan dalam bentuk pemotongan dari penghasilan dalam masa 15 tahun.

Desa Perdana tidak ikut dalam menyampaikan keberatan, dan pandangan umum mengesankan kalau mereka bahagia dengan kehadiran PT Rea karena mereka bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari perusahaan. Kami dapat Rp. 3 juta sampai Rp. 6 juta per bulan dari dua hektar, cukup untuk hidup dan membiayai sekolah anak-anak kami. Kami

belum pernah ribut dengan PT Rea. Mereka juga membawa bantuan pembangunan bagi kami, seperti balai kesehatan, gratis untuk karyawan dan pekerja PT Rea, serta anggota keluarga mereka. Banyak warga sini dipekerjakan oleh PT Rea, di tingkat-tingkat yang berbeda, atau bagian dari plasma. (Pak Philipus Njang) Di Muai, pola PPMD juga sepertinya diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Dalam pola ini, anggota masyarakat disediakan bibit, pupuk dan pestisida oleh perusahaan, dan terikat kontrak tertulis yang mewajibkan mereka menjual TBS kepada PT Rea melalui koperasi (Belayan Sejahtera). Koperasi telah tumbuh besar dari 30 petani menjadi lebih dari 180 anggota tahun lalu, yang menyimpan tanda terima, kontrak dan pembayaran atas nama anggota koperasi. Ada juga catatan positif. Cukup banyak jumlah bantuan pembangunan masyarakat telah disediakan oleh PT Rea Kaltim Plantations untuk beberapa desa termasuk Pulau Pinang, Perdana dan Muai, dalam bentuk generator, air bersih, balai kesehatan dan sekolah. 63 Listrik juga disediakan oleh perusahaan untuk Pulau Pinang dengan gratis dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi. Sementara masyarakat Hambau menyatakan sangat sedikit bantuan pembangunan yang diberikan perusahaan dibandingkan dengan desa-desa lain (dan hal ini dibenarkan oleh perusahaan).

Akses Informasi Keluhan utama masyarakat di semua desa yang dikunjungi adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh perusahaan mengenai operasional perusahaan, dan tentang hak-hak anggota masyarakat atas kompensasi, plasma dan FPIC. Enam kelompok

masyarakat yang diwawancarai semua menyampaikan rekomendasi agar jalur komunikasi diperbaiki dan ditingkatkan. Di Hambau, contohnya, anggota masyarakat mengatakan bahwa mereka harus mencari informasi melalui jalur mereka sendiri daripada melalui perwakilan perusahaan. Masyarakat juga melaporkan bahwa informasi sangat terbatas disampaikan oleh kepala desa dan tokoh adat yang terlibat. Mungkin perusahaan menyampaikan dengan kepala desa dan pengurus di tingkat desa tetapi mereka tidak berkomunikasi dengan kami masyarakat. Kami tidak yakin siapa yang harus disalahkan untuk masalah ini; perusahaan, atau perwakilan kami sendiri. (anggota masyarakat) Kami tahu mengenai Permentan 26/2007 mendengar dari media, nonton TV, mendengar dari mulut ke mulut. Informasi yang kami miliki mengenai hal ini, dan aspek-aspek lain kegiatan perusahaan, sangat sedikit sekali. Kami mendengar tentang RSPO, tetapi tidak dari perusahaan. Saya mengetahui apa itu HGU, plasma dan inti dari seorang teman yang bekerja di PT Rea, dan dia memberitahu saya bahwa ini adalah informasi rahasia yang harus tetap dirahasiakan. Saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Dan itu tahun 2010 yang lalu.

Pak Ridwan menyebutkan bahwa mereka menyalahkan sikap masa bodoh diri kami dan kurangnya pendidikan untuk sekarang tahu mengenai hak-hak kami. (anggota masyarakat) Seperti baru saja dibangunkan dari tidur untuk sadar bahwa kami ada hak. (anggota masyarakat) Kami belum cukup berani karena kami belum yakin hak-hak kami, tetapi kami menjadi lebih berani sekarang. (anggota masyarakat) Pembentukan tim desa, tim

batas desa, tim plasma dan tim perundingan (juga dikenal sebagai Tim 42 di Kembang Jenggut) berperan sebagai perantara antara perusahaan dan masyarakat dipandang bermasalah oleh banyak anggota masyarakat karena berbagai alasan. Pertama, mereka tidak yakin siapa saja anggota tim desa karena hal ini tidak pernah disosialisasikan kepada mereka. Kedua, beberapa warga mengeluhkan bahwa tim desa diaktifkan hanya kalau ada masalah muncul, daripada memainkan peran pemantauan terusmenerus. Ketiga, informasi tidak selalu dikomunikasikan oleh tim desa kepada masyarakat luas pada waktunya, khususnya informasi mengenai pelaksanaan pola plasma. Seperti disampaikan bahwa jalur-jalur komunikasi dengan PT Rea perlu ditingkatkan dan dipantau dengan baik oleh perusahaan untuk memastikan keterlibatan masyarakat tercapai.

Tim desa harus lebih pro-aktif menghubungi kami dan berkomunikasi dengan kami. Jika tidak, kesan kami adalah perusahaan bersembunyi di balik tim desa atas tuntutan kami (bermukakan tembok, bertelingakan batu). Pak Aslan Kadang-kadang, saat perusahaan bertemu dengan perwakilan kami, mereka dibawa ke Samarinda atau Tenggarong untuk pertemuan, yang merupakan masalah bagi masyarakat yang tidak hadir. Pak Muhammad Lukman Berkenaan dengan dokumentasi, di dua desa, kepala desa memiliki dokumen-dokumen terkait termasuk peta dan kontrak plasma PT REA Kaltim Plantations (Kembang Jenggut dan Perdana). Dokumen tersebut termasuk peta batas-batas konsesi kebun, kesepakatan patok-patok batas mengenai kawasan konservasi di Kembang Jenggut, peta klasifikasi lahan dari Kementerian Kehutanan, kesepakatan

pembentukan tim desa dari 2006 dan berbagai kesepakatan masalah pembayaran ganti rugi lahan. Meskipun begitu, anggota masyarakat tidak tahu atau tidak memiliki salinan laporan kawasan nilai konservasi (HCVA), laporan dampak sosial dan lingkungan (ESIA), AMDAL atau peta yang dibuat pemerintah atau perusahaan.

Tidak satupun di antara anggota masyarakat yang kami wawancarai pernah mendengar FPIC. Di satu desa (Muai), dilaporkan bahwa masyarakat telah dilibatkan dalam pemetaan partisipatif dengan PT Rea, tetapi peta ini kemudian dipakai untuk mencari lahan untuk dibuka, bukan tanah adat atau plasma. Tidak satupun anggota masyarakat yang diwawancarai sadar kalau ada SOP perusahaan berkenaan dengan pengakuan dan penetapan batas atas tanah-tanah adat, mekanisme resolusi konflik atau mekanisme komunikasi para pemangku kepentingan. Peta administrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan diberitakan belum dibagikan oleh pemerintah desa, atau secara aktif digunakan untuk membantu hak-hak masyarakat atas tanah benar-benar diakui dalam praktek. Kantor Badan Pertanahan Provinsi dilaporkan telah memetakan tanah adat Kembang Jenggut di dalam konsesi PT Rea Kaltim Plantations, tetapi anggota masyarakat memberitahukan kalau mereka tidak pernah menerima salinan peta tersebut. Tanpa peta, kami tidak tahu batas-batas konsesi perusahaan, dan bagaimana tanah adat milik kami cocok di dalam peta itu. Meskipun kami tahu ada tanah kami yang telah diambil, kami tidak bisa menuntut hak-hak kami dalam peta nyata, dan itu membuatnya

sangat sulit bagi kami. (Pak Ridwan) Masyarakat perlu tahu hak-hak mereka.

Perusahaan dan masyarakat harus terlibat dalam dialog sehingga perusahaan dapat mengetahui kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta alasan mengapa tanah begitu berarti bagi masyarakat. Proses ini harus timbal-balik agar semuanya berjalan maju dengan menghargai hak. Pak Aslan menyebutkan bahwa beberapa anggota masyarakat mengeluh kurangnya informasi yang diberikan kepada mereka oleh perusahaan dan pemerintah mengenai hak-hak mereka menurut hukum nasional. Beberapa di antara anggota masyarakat memandang hal ini sebagai tanggung jawab kedua belah pihak. Kami tidak mengerti hukum, jadi kami tidak mengerti hak-hak kami. Kami tidak dapat benar-benar menyuarakan pandangan kami karena kami kurang informasi. Kami sekarang baru mulai mendapat informasi dengan cara kami sendiri, dan lebih berani buka mulut kami. Pak Ridwan menyebutkan bahwa Pemerintah tahu hukum tetapi kami tidak tahu hak-hak kami sesuai hukum yang berlaku. Jujur saja kami merasa bahwa rejim Orde Baru masih berkuasa dalam tanah kami. Pak Ridwan Di Kembang Jenggut, beberapa anggota masyarakat bingung mengenai lokasi dan luas HGU perusahaan, dan apakah lahan kebun plasma harus di dalam atau diluar HGU.

Salah satu laporan telah diangkat oleh desa Kembang Jenggut di tingkat Dinas Perkebunan dan Sekretaris Daerah seputar masalah ini, dan masyarakat masih dalam negosiasi dengan perusahaan untuk klarifikasi wilayah dan batas-batas tanah adat Kembang Jenggut didalam konsesi PT

Rea Kaltim Plantations. Hanya satu desa (Perdana) telah mendengar RSPO dari perwakilan perusahaan tetapi istilah FPIC tidak diketahui oleh anggota masyarakat yang diwawancarai. 64 Kurangnya pengetahuan tentang RSPO antara pemangku kepentingan plasma dan PPMD juga ditemukan sebagai ketidak-patuhan dalam laporan CUC.

Masalah lain yang diangkat masyarakat (Hambau dan Kembang Jenggut) berkenaan dengan jalur-jalur komunikasi dengan PT Rea Kaltim Plantations adalah terlalu seringnya pergantian staf dan perwakilan perusahaan mengakibatkan kebingungan akan siapa yang mereka temui jika muncul masalah, dan penundaan memberikan tanggapan oleh perusahaan sebab staf baru perlu waktu untuk memahami masalah yang sedang terjadi. Kadang-kadang kami merasa mencapai sesuatu dengan satu perwakilan perusahaan, dan masalah kami diselesaikan, tetapi kemudian perubahan staf, kami harus mengulang seluruh cerita lagi. Proses ini menjadi lama. Pak Aslan mengatakan bahwa masalah ini juga diangkat oleh anggota masyarakat dari Perdana, yang mencatat bahwa, sering sekali, kesepakatan yang ditanda-tangani antara masyarakat dan perusahaan ditanda-tangani oleh perwakilan perusahaan yang terlibat, tetapi tidak dicap dengan cap resmi perusahaan. Akibatnya, dalam beberapa kejadian, perubahan staf berarti kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak lagi diakui oleh perusahaan, sebab ditandatangani atas nama staf manajemen yang lalu.

Satu tuntutan dari masyarakat adalah untuk meresmikan kesepakatan dan kontrak dengan menggunakan cap perusahaan daripada

hanya tanda-tangan saja. Berkenaan dengan masalah ini, perusahaan mengatakan bahwa perusahaan memiliki kebijakan yang berlaku bahwa seluruh kesepakatan dan kontrak harus disahkan dan ditanda-tangani oleh Presiden Direktur.

Pertemuan dengan perwakilan desa di Perdana/Agus Wiyanto Pembangunan/Protes Masyarakat melaporkan ada beberapa protes atas masalah plasma dan ganti rugi di dalam konsesi PT Rea Kaltim Plantations. Protes tersebut termasuk di salah satu pabrik perusahaan pada bulan Mei 2004 oleh Desa Muai (mengakibatkan pabrik ditutup sementara kegiatannya) dan tahun 2011 oleh anggota masyarakat dari Ritan Baru dan Gunung Sari akibat pencemaran sungai oleh limbah perusahaan. Pada saat penulisan laporan ini, tiga desa (Long Beleh Modang, Muai dan Kembang Jenggut) memblokade lima jalan perusahaan di dalam konsesi perusahaan dalam pembangunan selama 25 hari, blokade berakhir tanggal 8 Juli 2012 PT Rea Kaltim Plantations dilaporkan setuju menawarkan ganti rugi sejumlah Rp. 70 juta kepada masyarakat yang protes, tetapi tidak PT REA Kaltim Plantations ada kesepakatan formal akan hal ini saat penulisan laporan ini.

Menurut beberapa warga masyarakat, protes ini memiliki pengaruh banyak, sebab desadesa lain menyadari akan hak-hak mereka yang belum terpenuhi. Satu protes memicu protes lain, sebab masyarakat mulai menyadari bahwa mereka dapat menuntut lahan plasma dan ganti rugi atas tanah mereka yang dirampas. (Pak Ridwan) Meskipun begitu, sepertinya masyarakat tidak bermaksud untuk mengambil langkah-langkah

yang lebih keras untuk menyampaikan keluhan mereka kepada perusahaan, sebab mereka umumnya berharap masalah dapat diselesaikan dengan damai, dan mereka dapat keuntungan dari kehadiran perusahaan. Kami tidak mau perusahaan tutup. Kami hanya mau berbagi keuntungan dengan mereka, dan menyaksikan janji-janji mereka kepada kami dipenuhi. Ketika kami membangkang, Brimob dan polisi datang meminta kami untuk tidak membuat masalah. Kami beritahu mereka bahwa kami tidak sedang mencari masalah. (Pak Wahidu) Yang menarik adalah, beberapa anggota masyarakat (di Hambau, Perdana dan Pulau Pinang) mengakui bahwa mereka memang tidak ingin perusahaan meninggalkan wilayah mereka, mereka juga sadar bahwa mereka hampir sepenuhnya ketergantungan pada keberadaan perusahaan dan kesempatan ekonomi yang perusahaan bawa. Menurut perwakilan PT REA Kaltim Plantations yang diwawancarai, sekitar 1.500 orang dari desa-desa sekitarnya bekerja untuk PT REA Kaltim Plantations, dengan sekitar 5.000 tanggungan. Meskipun begitu, mereka mendapatkan keuntungan dari kesempatan kerja, beberapa warga masyarakat menggambarkan ketergantungan sebagai hasil dari perubahan atas tata guna lahan yang terjadi di luar kendali mereka. Kami mungkin tidak puas dengan kehadiran perusahaan. Jadi kami mungkin mendukung perusahaan, tapi bukan berarti tanpa pilihan. Hutan sudah habis, tanah juga habis, jadi kami harus melihat perusahaan sebagai sumber penghasilan.

Hak Adat dan peran Pemerintah dan Perusahaan Pemerintah Perwakilan pemerintah dari BPN Kutai Kartanegara (Kukar) dan Dinas

Kehutanan dan Perkebunan yang diwawancarai di Tenggarong bertahan pada pendapat bahwa usaha dan kepatuhan hukum PT REA Kaltim Plantations memuaskan, dan peluang ekonomi yang disediakan bagi masyarakat oleh perusahaan disambut baik oleh Dishutbun. Persoalan penting yang harus diselesaikan, catatan mereka, adalah 'masalah, bukan konflik dan walaupun mereka membenarkan bahwa konflik pernah muncul di masa lalu, mereka yakin bahwa perusahaan sudah mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keberatan masyarakat dan memberikan ganti rugi dimana ada tuntutan hak yang sah disampaikan.

Menurut pandangan kami, tanggung jawab PT REA Kaltim sudah selesai. Pola PPMD telah dipenuhi. PT REA Kaltim adalah perusahaan yang baik. (Kepala Dishutbun, Kukar) PT REA Kaltim tidak ada tunggakan tanggung jawab, sebab perusahaan ini telah melaksanakan seluruh tanggung jawabnya. (Pak Sandi, Kantor BPN, Tenggarong) Meskipun begitu, penting untuk diperhatikan bahwa kurangnya keterlibatan dan inisiatif yang diambil oleh pemerintah kabupaten dan lembaga negara terkait dalam hal resolusi dan mediasi konflik antara masyarakat dan perusahaan, disoroti oleh beberapa anggota masyarakat. Satu dari mereka, misalnya mengatakan bahwa 'bukannya berperan sebagai jembatan bagi kedua belah pihak, pemerintah daerah tidak memaksimalkan PT REA Kaltim Plantations kewenangannya, dan lebih menempatkan diri sebagai 'penjaga gawang' daripada 'tim pemain.' Beberapa pendapat serupa dikemukakan mengenai DPRD Kabupaten Kukar, yang mengatakan untuk menyerap aspirasi masyarakat tetapi tidak mewakili mereka dalam tindakan.

Mengenai sebuah catatan yang menggembirakan, dilaporkan pada bulan Juni 2012.

Bupati mengatakan akan membantu dalam penyelesaian sengketa dan arbitrase dimana diperlukan. Banyak pengaduan berkenaan dengan plasma dan ganti rugi yang tidak dipenuhi disampaikan oleh masyarakat kepada BPN, DPRD dan Dishutbun minim tanggapan dan tidak ada tindakan. Kecewa dengan kurangnya inisiatif pemerintah dan peran dalam mendorong pemenuhan plasma yang dijanjikan mengakibatkan protes di kantor pemerintah kabupaten oleh warga masyarakat dari Tukung Ritan dan Ritan Baru pada 28 Februari 2012, yang memaksa utusan bupati berjanji untuk menyampaikan permintaan masyarakat kepada Bupati sendiri. Seperti yang diakui oleh pegawai BPN dan Dishutbun, Kabupaten Kukar tidak memiliki peraturan berkenaan dengan penanganan konflik dan sengketa.

Sebaliknya BPN percaya pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Nomor 3 Tahun 2011. Hingga saat ini, mekanisme resolusi konflik hanya bersifat tim 'ad hoc' yang dibentuk ketika dan dimana muncul kebutuhan, dan sangat tergantung pada jenis konflik dan sektor yang dipertanyakan. Beberapa kegiatan pemetaan dilaksanakan dengan melibatkan BPN Pusat dan kecamatan, Dishutbun, Departemen Pertanian, Dinas Kehutanan, dan PT REA Kaltim Plantations sendiri telah memusatkan usaha menetapkan batas HGU, wilayah konservasi dan batas-batas konsesi, dan bukan tanah-tanah adat. Pejabat dari BPN mengakui bahwa pemetaan

tanah-tanah adat akan sangat membantu mencegah konflik tanah dan tumpang tindih hak, mereka juga mengatakan bahwa anggota masyarakat tidak perlu turut serta dalam aktifitas pemetaan, dan cukup hasil pemetaan disosialisasikan kepada mereka setelah itu.

Pejabat Dishutbun Kutai Kertanegara membenarkan bahwa sampai sekarang belum ada peraturan daerah bagi perlindungan tanah-tanah masyarakat desa atau tanah-tanah adat. Masyarakat tidak perlu ikut selain sosialisasi. Mereka tidak perlu ikut dalam pemetaan, atau penilaian NKT. Akhirnya, berkenaan dengan wakil-wakil pejabat pemerintah yang diwawancarai mengatakan tidak sadar akan artinya, adapula yang jelas-jelas menyamakan dengan sosialisasi oleh perusahaan dan pemerintah kepada masyarakat. Pernyataan serupa berkenaan dengan pemberian HGU, menurut pejabat BPN, hanya perlu sosialisasi setelah izin dikeluarkan untuk menjelaskan tujuan dan aturannya kepada masyarakat.

Gagasan FPIC sebagai hak, dilindungi dan dipenuhi melalui proses konsultasi, negosiasi dan dialog berulang tuntas, hanya dianggap pernyataan berlebihan oleh perwakilan pemerintah yang diwawancarai. Sosialisasi hanya diperlukan ketika perusahaan mulai bekerja di dalam suatu wilayah, ketika perusahaan dan pemerintah memberitahukan masyarakat apa rencana mereka dengan tanah. (Pak Sandi) Penting juga diperhatikan bahwa perwakilan pemerintah yang diwawancarai tidak sadar akan RSPO, Prinsip dan Kriteria, keanggotaan PT REA Kaltim Plantations dengan RSPO, atau sertifikasi perusahaan baru-baru ini. PT REA Kaltim Plantations Tahap awal hubungan PT Rea Kaltim Plantations dengan

masyarakat lokal yang tinggal di dalam konsesi perusahaan sebatas berbagi informasi mengenai manfaat ekonomi dan sosial pembangunan kelapa sawit, daripada pertimbangan bagi hak masyarakat untuk memberi atau tidak memberikan persetujuan mereka terhadap proyek pembangunan dalam tanah-tanah adat mereka. Dalam berbagai cara, langkah-langkah yang ditempuh untuk mengakui dan mendukung hak-hak masyarakat lokal dapat dilihat sebagai alat untuk memperbaiki kurangnya pengakuan atas FPIC masa lalu. Menurut perwakilan perusahaan, masyarakat lokal di dalam konsesi sasaran didata dan dihubungi melalui kepala desa dan camat. Pada 1994–1995 (misalnya tiga tahun setelah PT Rea pertama menemukan wilayah konsesi tetapi sebelum membuka lahan), pembagian informasi (sosialisasi) dalam bentuk pertemuan pemangku kepentingan utama diselenggarakan di Samarinda, dan serangkaian pertemuan tindak lanjut di kecamatan dan tingkat desa, dimana wakil-wakil masyarakat juga diundang. Kira-kira waktu inilah tim desa dibentuk oleh perusahaan, melibatkan perwakilan masyarakat seperti kepala desa dan tokoh adat. Tanggung jawab diberikan kepada tim ini untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Dengan tim desa, pematokan batas-batas konsesi dan kompensasi lahan dibayar kepada masyarakat.

Menurut perwakilan perusahaan, sosialisasi terdiri dari kegiatan memberitahukan masyarakat bahwa PT Rea Kaltim Plantations sedang berencana membuka sebuah perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka. Perusahaan juga memberitahukan masyarakat bahwa mereka akan mendapat keuntungan dari kesempatan kerja dengan pembangunan

perkebunan kelapa sawit. Menurut wakil perusahaan, masyarakat paling banyak mendukung proses pembukaan lahan pada saat itu. Penanaman baru dilakukan setelah perusahaan mendapatkan izin lokasi pada tahun 1993-1994 dan masih berlangsung hingga sekarang. Menurut perusahaan, pola PPMD pertama kali dijalankan tahun 1994. Departemen khusus dibentuk oleh PT Rea Kaltim, mencakup sosialisasi konsep dan mendata tanah-tanah masyarakat yang ada untuk menjalankan pola ini. PPMD pertama dijalankan di Pulau Pinang dan Long Beleh Modang. Perusahaan menyediakan dukungan manajerial dan teknis dengan membangun koperasi termasuk menyediakan bibit sawit, pupuk dan pestisida, semua biaya ini dibayar oleh anggota masyarakat setelah 5 tahun masa tanam dipotong beberapa persen dari hasil panen buah sawit. Menurut wakil perusahaan, beberapa anggota masyarakat setempat mendekati perusahaan dan menawarkan tanah mereka untuk pola tersebut setelah itu perusahaan menyediakan dukungan material dan pelatihan. Pola manajemen satu atap mulai tahun 2008, sejak saat itu permohonan baru untuk PPMD tidak lagi diterima. Awalnya perhatian perusahaan terpusat pada pola PPMD daripada plasma sebab PT Rea Kaltim adalah Penanaman Modal Asing (PMA), tidak mempunyai tanggung jawab hukum untuk menjalankan plasma.

Pola plasma dijalankan pertama kali sekitar tahun 2008 di beberapa desa yang ada setelah berlakunya Peraturan No.26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Sosialisasi plasma dilaporkan berlangsung sejak tahun 2008 di

sembilan desa dengan ditandatanganinya kontrak oleh orang perorangan warga desa dan disimpan oleh koperasi. Pinjaman dari bank dikelola oleh koperasi, dan anggota-anggota koperasi dipilih oleh desa. Perusahaan juga membentuk Departemen Plasma dengan posisi Kepala Plasma yang semuanya adalah karyawan perusahaan. Wakil perusahaan mengakui bahwa sedikit sekali jumlah plasma yang telah dipenuhi hingga saat ini, dan mereka sedang dalam proses mencari lahan untuk membuka sisa lahan untuk plasma. Kontrak untuk tambahan lahan hampir siap selesai dengan tetangga konsesi REA Holdings PLC dengan PT KKS (Kartanegara Kumala Sakti), akan diberikan plasma untuk masyarakat lokal dalam PT Rea Kaltim Plantations. Dokumen dan catatan pertemuan antara masyarakat dan perusahaan diberikan kepada tim desa yang bertanggung jawab menyediakan dokumen-dokumen tersebut kepada anggota masyarakat jika mereka meminta. Sementara pertemuan-pertemuan dengan anggota masyarakat hanya terjadi ketika terjadi masalah, perusahaan memastikan bahwa sebisa mungkin wakil pihak ketiga hadir (termasuk NGO lokal seperti Laskar, Komando dan GMP).

Perusahaan juga sebisa mungkin berusaha langsung menyelesaikan masalah melalui negosiasi dan dialog, mengupayakan proses hukum sebagai upaya terakhir sebab mereka tahu masyarakat berada dalam posisi tawar yang lemah dan apalagi hasil yang menyenangkan semua pihak juga tidak mungkin dicapai. Kami memilih negosiasi dan mediasi untuk penyelesaian konflik. mereka mau menyelesaikan masalah secara damai. (Pak Murali) Perusahaan PT Rea Kaltim Plantations menyewa pengamanan

swasta untuk menjaga keamanan wilayah konsesi dan karyawan perusahaan, dan pasukan organik polisi Brimob masuk dalam konsesi perusahaan ketika ada aksi pembangkangan atau protes dan demonstrasi oleh masyarakat, meskipun dilaporkan bahwa perusahaan tidak pernah menghadapi masalah serius di lapangan, dan tidak ada konflik yang parah terjadi dengan masyarakat lokal. Mekanisme resolusi konflik juga telah dikembangkan dan disosialisasikan kepada tim-tim desa. Perusahaan sudah melakukan dua kajian AMDAL (tahun 1995 dan 2000) dan satu penilaian HCV yang dilaksanakan oleh perusahaan konsultan Tropenbos.

Wilayah konservasi di dalam konsesi perusahaan dikelola oleh satu tim spesialis dalam tiga divisi Divisi Keanekaragaman Hayati, Divisi Jasa Ekosistem dan Divisi Pembangunan Masyarakat. Anggota masyarakat setempat diberi ganti rugi atas lahan yang sekarang berada di dalam wilayah konservasi tetapi ada beberapa kawasan di dalam areal konservasi dimana ganti rugi lahan belum selesai.

Sosialisasi AMDAL dilakukan tahun 1992 dan AMDAL yang digunakan saat ini adalah versi 13 Juni 2011. Dokumen AMDAL tersebut terdiri dari rencana kerja lingkungan (RKL), dan rencana pengelolaan lingkungan (RPL). Perusahaan sepenuhnya mendukung departemen konservasi (REA KON) yang terdiri dari 8 anggota tetap dari karyawan perusahaan dan berpengalaman bekerja untuk organisasi konservasi. Staf Rea Kon juga bekerja secara intensif dengan banyak organisasi seperti LIPI, Universitas Mulawarman (UNMUL) di Samarinda, Singapore Botanical Garden, konsultan internasional dan peneliti-peneliti universitas.

Masyarakat lokal boleh masuk ke dalam wilayah konservasi untuk kebutuhan sehari-hari (misalnya mengumpulkan hasil hutan bukan kayu seperti sayur, buah dan ikan) serta ikut dalam pertanian terbatas di areal batasbatas wilayah konservasi, tetapi disarankan oleh perusahaan untuk menjaga dan melindungi kawasan konservasi melalui sosialisasi dan aktivitas pendidikan. Jika masyarakat punya kepentingan terhadap kawasan konservasi, kami bersedia membuat enklav bagi mereka, tetapi sampai sekarang kami tidak menerima tuntutan seperti itu. Faktanya, masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada kawasan tersebut, hanya sangat sedikit, tidak ada orang yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut sebelumnya. Pak Murali menyebutkan bahwa PT Rea Kaltim Plantations telah membentuk sebuah program Pembangunan Masyarakat (*Community Development*), yang dijalankan dan dipantau oleh satu tim anggota tetap yang berada di beberapa desa (Muai, Long Mahli, Long Beleh Haloq, Long Beleh Modang, Pulau Pinang, Perdana, Kembang Jenggut, Kelekat dan Bukit Layang).

Menurut wakil perusahaan, program pembangunan masyarakat berjalan dengan sangat baik dan masyarakat merasa mereka dapat mendekati tim dengan permintaan mereka dengan mudah. Program pembangunan masyarakat termasuk pengadaan listrik (gratis di beberapa desa) dan air bersih, membangun sekolah, balai kesehatan dan generator. Secara keseluruhan, PT Rea Kaltim Plantations menunjukkan sikap pro-aktif dalam menampung dan mendukung kebutuhan dan tuntutan masyarakat lokal melalui proses negosiasi dan dialog, yang didukung tindakantindakan nyata untuk mencapai tujuan ini. Apapun tuntutan mereka, kami akan

mencoba menjadi pelayan untuk masyarakat. Mbak Adriana mengatakan Konsorsium NGO mendata beberapa masalah di lapangan berhubungan dengan kompensasi dan plasma yang belum diselesaikan, tapi tidak ada yang bisa dinamakan 'konflik'. Banyak upaya perusahaan untuk membentuk tim-tim perantara (misalnya tim desa dan tim plasma) di tingkat desa serta di dalam organisasi perusahaan (misalnya Departemen Plasma, Program Pembangunan Masyarakat). Hal ini merupakan tanda sikap terbuka dan mau berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal. Staf PT. Rea Kaltim Plantations yang diwawancarai juga menunjukkan perhatian dalam memahami perspektif masyarakat lokal seperti disampaikan kepada konsorsium NGO mengenai kegiatan usaha perusahaan. Mereka menekankan bahwa dukungan dan nasehat dari NGO diharapkan sebagai bagian dari usaha perusahaan untuk meningkatkan praktek mereka di lapangan. Kami siap menerima setiap kritikan untuk memperbaiki kinerja kami dan memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Keterangan Pak Murali bahwa sepertinya tidak ada pembatasan akses masyarakat untuk masuk ke lahan di dalam kawasan konservasi. Tidak ada keluhan dikemukakan tentang masalah ini selama wawancara dengan masyarakat. Sementara itu, terkait dengan tunggakan pemenuhan plasma dan masalah pembayaran ganti rugi, perusahaan sadar akan tuntutan-tuntutan tersebut dan sedang berusaha menyelesaikan masalah tersebut.

Masyarakat setempat umumnya mendukung keberadaan perusahaan, dan berharap mendapatkan keuntungan yang sama seperti

desa-desa lain dimana plasma sudah dijalankan seperti desa Perdana dan Pulau Pinang. Masalah-masalah komunikasi disampaikan oleh beberapa anggota masyarakat muncul akibat kurangnya penyampaian informasi di dalam oleh wakil-wakil desa sendiri (misalannya kepala desa dan tim desa) kepada masyarakat, bukan karena kurangnya usaha pihak perusahaan untuk komunikasi dengan wakil-pilihan masyarakat sendiri. Meskipun begitu, upaya perbaikan terhadap proses menghargai hak atas FPIC masih sangat diperlukan. Seperti telah disampaikan sebelumnya, pada awal interaksi perusahaan dengan masyarakat setempat lebih dekat pada negosiasi dan kompensasi atas lahan dan hak, yang bukan merupakan proses untuk mencari persetujuan masyarakat. Bahkan sampai saat ini, sedikit sekali anggota masyarakat yang diwawancarai ingat dilibatkan dalam sosialisasi, baik pada tahap awal kegiatan usaha atau tahap akhir proses.

Wakil perusahaan yang diwawancarai juga merasa sulit menjelaskan apa yang dimaksud dengan FPIC dan bagaimana menghargai hak FPIC dalam penerapannya. Mereka juga tidak bisa menjelaskan perbedaan antara FPIC, sosialisasi dan konsultasi, menyarankan bahwa FPIC adalah hak, bukan sebuah proses, belum benar-benar diakui atau diteliti. Berkenaan dengan dokumentasi, tidak satupun anggota masyarakat yang diwawancarai punya salinan dokumen seperti AMDAL, ESIA atau HCVA, atau informasi mengenai HGU yang didapatkan oleh perusahaan. Masalah penting yang ditemukan adalah tidak ada pemetaan partisipatif atas tanah-tanah adat, satu kekurangan yang diakui oleh masyarakat lokal dan

perusahaan. Orang lain menuntut hak terhadap lahan yang sama, dan ini juga menyebabkan konflik antar dan di dalam desa. (Mbak Adriana) Banyak masalah dapat diselesaikan andai saja kami punya peta yang jelas, dengan batas yang jelas, yang seharusnya kami ikut susun. (Pak Aslan, kepala desa Kembang Jenggut) Ada anggota masyarakat menuntut kompensasi yang tidak masuk akal atas lahan, yang sebenarnya bukan tanah mereka. Dalam kasus ini kami merasa seperti korban. Kami merasa seperti pohon dapat digoyang untuk menghasilkan buah walaupun kekurangan ini diakui oleh wakil PT Rea Kaltim Plantations, dan indikator Kriteria 2.3 P&C RSPO merujuk pada pemetaan hak-hak adat yang diakui pada saat penulisan ini, perusahaan tidak berusaha untuk berencana untuk mengambil tindakan-tindakan untuk melaksanakan pemetaan partisipatif, sebab mereka melihat ini sebaliknya adalah tanggung jawab lembaga pemerintah. Kami tidak mau mengambil alih wewenang pemerintah. Mereka hanya dapat membantu proses pemetaan partisipatif. Meskipun begitu, bukti menunjukkan bahwa kurangnya kejelasan batas-batas tanah adat merupakan satu faktor menyebabkan tidak jelasnya batasan hak perorangan dan masyarakat atas tanah, yang kemudian membuka ruang tuntutan yang memanfaatkan kesempatan dan permintaan kompensasi dinaikkan, khususnya ketika nilai tanah meningkat.

Mengenai plasma, masalah utama yang ditemukan adalah perusahaan sedang bekerja mendata untuk dijadikan kebun plasma, tetapi masyarakat lokal tidak diberitahukan mengenai hal ini dan oleh karena itu mereka beranggapan bahwa perusahaan tidak serius untuk mengupayakan

pemenuhan kesepakatan plasma untuk dijalankan. Langkah-langkah prosedural pola plasma sepertinya belum disosialisasikan kepada masyarakat, yang mungkin apabila telah dilakukan, bisa membantu menghindari ketidak-pastian dan kekecewaan di pihak masyarakat. Sementara itu, hingga kini konflik belum terjadi. Konflik dapat diantisipasi. Jika perusahaan tidak mengambil langkah-langkah untuk menjelaskan dan memberitahukan masyarakat mengenai masalah plasma, protes akan bertambah banyak dengan dampak-dampak yang mengganggu masyarakat dan kegiatan usaha perusahaan.

Prinsip dan Kriteria RSPO terpampang di luar kantor Perdana Estate Division/Sophie Chao Terakhir, walaupun PT Rea Kaltim Plantations kelihatan sangat fokus pada konservasi dan rehabilitasi kawasan-kawasan hutan rusak berat akibat pembalakan (dan sangat berhasil di sini), namun wakil perusahaan yang diwawancarai (termasuk manajer lingkungan dan staf), nampaknya kurang paham mengenai konsep HCV. Meskipun telah melakukan penilaian HCVA, klasifikasi HCV tidak digunakan untuk membuat patok-patok batas kawasan konservasi. Perusahaan mengatakan bahwa dalam pandangan mereka Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (HCVA) dan suatu Kawasan Konservasi adalah sama dan disamakan sebagai habitat alami yang dikeluarkan sebab dianggap memiliki nilai ekologis, sosial atau budaya. Perusahaan berpendapat bahwa sangat sedikit orang yang paham apa HCV 1, 2, atau 3 sehingga mereka menyebut kawasan tersebut sebagai areal konservasi sebab ini adalah terminologi yang umumnya karyawan perusahaan dan masyarakat lokal mengerti. Masyarakat boleh

menanam pohon buah dan berburu secara terbatas, dan tidak ada sengketa dengan masyarakat setempat atas akses terhadap kawasan konservasi di laporkan. Menurut wakil perusahaan yang diwawancarai, kawasan konservasi tersebut sudah ada sebelum perusahaan menjadi anggota RSPO, begitu juga divisi konservasi, dan mereka tidak merasa perlu membentuk klasifikasi HCV di dalam kawasan tersebut dengan alasan-alasan tersebut di atas. Selain itu juga disarankan agar klasifikasi HCV lebih sesuai bagi perusahaan yang baru mulai kegiatan usahanya agar memastikan konservasi dipertimbangkan dalam praktek dan tata guna lahan mereka. Dulu mereka tidak mengeluarkan kawasan konservasi dan mulai mengelola kawasan konservasi hanya untuk memenuhi Prinsip dan Kriteria RSPO sesuatu yang sudah kami lakukan sebab kami mengakui bahwa konservasi itu penting.

Masyarakat sepenuhnya boleh masuk ke dalam zona konservasi. Tetapi apa yang kami lakukan adalah menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk mereka untuk mendorong pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap kawasan konservasi tersebut. (Sophie Persey)⁷⁵ Pertemuan konsorsium NGO dan wakil PT REA Kaltim Plantations di Perdana Estate/Carlo Nainggolan. Anggota masyarakat dalam skema PPMD menerima bibit sawit, pupuk dan pesticide dari PT REA Kaltim Plantations, kepada siapa mereka menjual TBS/Sophie Chao Antar 20% dan 35% konsesi PT REA Kaltim Plantations ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Analisis Hukum Beberapa penyimpangan hukum ditemukan dalam kegiatan usaha PT Rea Kaltim Plantations berkaitan dengan proses pembebasan

lahan, keterlibatan masyarakat dalam Penilaian Dampak Lingkungan, dan realisasi kebun plasma.

Berkenaan dengan proses pembebasan lahan, menurut Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 yang menyebutkan bahwa Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru. Pasal 1 bagian 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 1994, menyatakan bahwa Perolehan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui pemindahan hak atas tanah atau dengan cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak. Peraturan ini membedakan antar dua status kepemilikan lahan, yakni tanah Negara yang diperoleh melalui pemindahan hak, dan hak tanah yang diperoleh melalui pemindahan atau penyerahan hak dengan ganti rugi. Prosedur perolehan tanah oleh sektor swasta di bawah Pasal 2 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 1994 menjelaskan bahwa: Perolehan tanah dilaksanakan secara langsung antara perusahaan dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah atas dasar kesepakatan (penekanan ditambahkan). Audit CUC terhadap PT Rea Kaltim Plantations Audit sertifikasi RSPO PT Rea Kaltim Plantation dilaksanakan 28 Februari- 4 Maret 2011 oleh Control Union Certifications. Dalam beberapa hal, konsorsium NGO percaya pada CUC

dalam melaksanakan pengamatannya di lapangan, sayangnya informasi yang tersedia dari audit dibatasi sebagai laporan utuh dan *checklist* lengkap berisi beberapa informasi rahasia dan merupakan dokumen yang tebal digunakan oleh panel keputusan sertifikasi dan lembaga sertifikasi. Penting dicatat bahwa dokumen yang tersedia untuk umum menunjukkan sejumlah kekurangan.

Pertama, statistik penting, seperti total wilayah konsesi, total luas HGU yang didapat oleh perusahaan, luas kebun PPMD dan jumlah desa di dalam konsesi perusahaan tidak ada. Peta-peta yang disediakan sangat tidak sesuai sehingga hampir tidak mungkin menemukan lokasi desa-desa, plasma, PPMD dan kawasan konservasi. Ada bukti dari temuan-temuan lapangan bahwa tidak semua desa telah diidentifikasi dalam audit, atau dikunjungi, sebagai bagian dari audit. Audit menyatakan bahwa 8 Prinsip RSPO hanya dipertimbangkan cukup untuk satu kebun saja sehingga 'tidak perlu mempertimbangkan prinsip lagi untuk setiap kebun sebab banyak kebijakan dan SOP berlaku terhadap semua kebun dan kedua pabrik'. Ketergantungan pada dokumentasi perusahaan dan contoh-contoh di satu kebun dari enam kebun menunjukkan bahwa data yang diperoleh langsung dari lapangan mengenai efisiensi penerapan dalam praktek atas kebijakan perusahaan sangat kurang. Terakhir, satu dari tiga ketidak-patuhan (pelanggaran) mengacu pada kriteria 1.3.6, yang agak membingungkan sebab hanya ada dua kriteria dari Prinsip dan Kriteria RSPO mengenai Komitmen terhadap Transparansi. Bagian 'ringkasan temuan berdasarkan kriteria' khususnya adalah tidak jelas dan kurang dalam uraian contoh-

contoh lengkap serta bukti untuk kepatuhan yang ditemukan. Dalam banyak kasus, keterkaitan antara temuan dan ringkasan bukti/tambahan komentar menyebabkan ambiguitas. Contoh, hak menggunakan tanah dapat dibuktikan, tidak dituntut oleh masyarakat lokal dengan hak yang dapat dibuktikan. Untuk kriteria ini, salah satu temuan adalah pembebasan lahan dengan FPIC. Meskipun begitu, bukti yang diberikan mengacu hanya pada sertifikat tanah HGU yang diperoleh perusahaan, dan sertifikat tanah dan dokumen-dokumen hukum pabrik Cakra dan Perdana. Laporan ini sangat tidak jelas bagaimana dokumen-dokumen tersebut membuktikan bahwa satu proses FPIC telah benar-benar dijalankan. Contoh lain adalah Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak menghilangkan hak hukum, atau hak adat daripengguna lainnya, tanpa keputusan bebas, didahulukan, dan diinformasikan, dimana temuan adalah bahwa hak adat diidentifikasi pada saat pembangunan perkebunan dan prosedur negosiasi dilaksanakan untuk kompensasi. Sangat patut dipertanyakan apakah negosiasi atas kompensasi dapat disamakan dengan usaha menghargai hak masyarakat lokal atas FPIC. Bukannya menggambarkan proses mencari persetujuan, bukti yang disediakan temuan ini terbatas pada gambaran singkat dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam proses justru menyarankan bahwa tahapan mengupayakan persetujuan langsung digantikan dengan negosiasi hubungan yang telah ditetapkan di antara perusahaan dan masyarakat.

Secara keseluruhan, hak atas FPIC kelihatannya telah diperlakukan dengan kacau, sesuai dengan kekurangan fokus dalam dimensi sosial

kegiatan usaha perusahaan dan dampak mereka pada masyarakat lokal. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Pemegang izin boleh membebaskan hak dan kepentingan pihak lain dari konsesi berdasarkan kesepakatan dengan pemilik hak atau pihak berkepentingan melalui jual beli, ganti rugi, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam kasus PT REA Kaltim Plantations, sosialisasi, pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi sering dilakukan tidak langsung dengan pemegang hak dan pemilik lahan tetapi melalui struktur pemerintah, misalnya pejabat pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan tingkat desa. Menurut anggota masyarakat proses-proses tersebut cenderung melibatkan kepala desa dan wakil formal daripada anggota masyarakat sendiri, sebagai pemegang hak atas tanah adat yang dimaksud. Situasi yang sama dilaporkan dalam mendata pemilik tanah, dimana perusahaan percaya sepenuhnya pada aparat pemerintahan desa untuk mendapatkan informasi tentang siapa yang memiliki tanah di bagian mana, daripada mendekati anggota masyarakat langsung. Selain itu, dokumentasi berkenaan dengan ganti rugi, negosiasi dan kesepakatan atas penyerahan lahan cenderung hanya disampaikan kepada desa dan tim desa yang dibentuk tetapi tidak kepada masyarakat luas. Meskipun diharapkan wakil-wakil desa tersebut akan memberitahukan masyarakat luas, temuan-temuan dari lapangan mengarahkan pada banyaknya anggota masyarakat masih tidak sadar dan

tidak pasti atas prosedur kompensasi dan hasil-hasil pertemuan antara wakil desa dan perusahaan.

Pemerintah Daerah Kalimantan Timur telah membentuk sebuah panitia dengan 9 anggota, dikenal sebagai Panitia Pembebasan Lahan atau Tim 9, sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab untuk: a) memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat; b) mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; c) mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya; d) mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c; e) menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; f) mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi; g) menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; h) menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik; i) membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak; j) mengadministrasikan dan

mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan k) menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

Pemerintah dan tim pembebasan lahan desa yang selalu terlibat langsung dalam proses penyebar-luasan dan proses negosiasi antara perusahaan dan masyarakat, sering gagal menyampaikan informasi penting khususnya mengenai ganti rugi kepada masyarakat luas, dan pemilik tanah adat melaporkan tidak diberikan kebebasan untuk membuat keputusan sendiri mengenai apakah dan/atau bagaimana tanah mereka akan digunakan oleh perusahaan. Tim pembebasan lahan bertindak sebagai cabang dan perantara antara pemilik lahan dan perusahaan dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal menyatakan bahwa: Perolehan tanah dilaksanakan secara langsung antara perusahaan dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah atas dasar kesepakatan. (penekanan ditambahkan) Selain itu, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Umum Hukum Perdata menyatakan bahwa: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika dianalisa lebih lanjut, ketentuan pasal ini juga memberikan kebebasan untuk pihak-

pihak yang terlibat untuk: 1. Membuat atau tidak membuat suatu kesepakatan 2. Memasuki sebuah kesepakatan dengan siapa saja 3. Menentukan isi kesepakatan, pelaksanaan dan persyaratan 4. Menentukan bentuk kesepakatan, tertulis atau lisan Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) 82 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa salah satu persyaratan yang syah persetujuan adalah: Harus ada persetujuan dari individuindividu yang "mengikatkan" dirinya. Pembagian informasi melalui pejabat desa dan tim desa tidak menyiratkan bahwa masyarakat diberikan pilihan untuk memberikan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC/KBDD) oleh masyarakat atas rencana investasi perusahaan dalam tanah-tanah adat masyarakat, khususnya ketika isi sosialisasi seperti hanya memberitahukan masyarakat atas rencanarencana perusahaan bukan mencari persetujuan dari masyarakat. Berkenaan dengan AMDAL, Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Pasal 26 ayat (2) seterusnya menjabarkan bahwa: Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan (penekanan ditambahkan).

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat tahu, mengerti dan sadar akan dampak-dampak potensial dalam lingkungan mereka muncul dari kegiatan usaha perusahaan.

Sementara itu PT PT REA Kaltim mengakui telah melakukan penyebaran dan konsultasi dengan desa-desa mengenai persiapan dokumen AMDAL perusahaan, bertentangan dengan pernyataan sebagian besar anggota masyarakat yang diwawancarai, termasuk kepada desa Kembang Jenggut dan Perdana, yang mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat dokumen AMDAL PT Rea Kaltim.

Anggota-anggota masyarakat yang diwawancarai melaporkan bahwa mereka tidak tahu persis apasaja aktifitas tim, apa saja aktifitas penyebaran dan konsultasi dilakukan terutama di kota kabupaten dan provinsi, berada jauh dari desa-desa. Meskipun begitu, perlu dicatat bahwa AMDAL perusahaan telah dikeluarkan Desember 1998 (14 tahun yang lalu), melibatkan wakil-wakil desa lainnya daripada wakil-wakil desa-desa yang ada sekarang. Terakhir, berkaitan dengan plasma, wakil perusahaan yang diwawancarai mengatakan bahwa perusahaan sebagai badan hukum asing, tidak dibebani kewajiban untuk memberikan plasma kepada masyarakat sebelum 2007, ketika Peraturan Menteri Pertanian No.26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 resmi berlaku (yakni, aturan tidak berlaku surut). Meskipun begitu, Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 menyatakan Pola kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995. Ayat tersebut dijabarkan lebih lanjut pada pasal 3 yang menyatakan: Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam: a. penyediaan dan penyiapan lahan; b. penyediaan sarana

produksi; c. pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi; d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan; e. pembiayaan; dan f. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Kemitraan semacam ini dalam perkebunan kelapa sawit telah diterapkan sejak akhir tahun 1970an, misalnya, program pola perkebunan inti rakyat (NES) (1978 sampai 2001), program Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA) yang menggantikan program PIRBun/NES (1995), dan sistem Manajemen Satu Atap melalui Keputusan Menteri Pertanian No.33/Permentan/OT.140.7/2006 mengenai Pembangunan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Pertanian. Peraturan di atas dan terdahulu mengenai pelaksanaan pola plasma sebelum 2007 menunjukkan bahwa pengembangan pola kemitraan dengan masyarakat lokal dalam bentuk plasma hanya dijabarkan oleh Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian No. 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan, berdasarkan peraturan ini, oleh karena itu masyarakat memiliki hak sah untuk meminta plasma. Keterbatasan atas Realisasi FPIC dan Keamanan Kepemilikan Tanah Perwakilan dan Pemecahan Politik pecah belah dan jajallah (*divide and rule*), atau *divide et impera*, sangat jamak dijalankan oleh penguasa penjajah Belanda di Indonesia sebagai alat memecah kelompok suku dan merusak hubungan kekuasaan antar tokoh-tokoh elit penguasa Indonesia, seperti Kesultanan dan Kerajaan.

Contoh khusus yang sangat gamblang dari strategi dan dampak merusaknya terlihat jelas selama Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*), yang

menunjukkan pemecahan masyarakat-masyarakat pedesaan di Jawa dan pemecah-belahan ikatan sosial dan organisasi sosial. Di bawah politik Tanam Paksa, desa-desa di Jawa dieksploitasi untuk menyediakan tanah murah dan buruh murah melimpah berdasarkan *Agrarischewet* yang mengatur bahwa tanah-tanah terlantar atau tanah-tanah yang kepemilikan tidak dapat dibuktikan milik Negara. PT REA Kaltim sendiri memperoleh izin untuk membuka usaha perusahaannya di wilayah ini dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara, dan hak-hak adat atas tanah dan sumber daya alam tidak diakui oleh di bawah hukum nasional dan provinsi. Masyarakat lokal, diarahkan kedalam situasi posisi tanpa pilihan, mendapatkan diri mereka bekerja kepada perusahaan dengan pilihan terbatas, baik melalui pola PPMD atau kemudian pola plasma.

Satu faktor yang menyumbangkan situasi ini adalah perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari anggota masyarakat dengan mendekati mereka secara orang perorangan, bukan secara kolektif bersama, berdasarkan kehendak masyarakat luas. Dengan kata lain oleh Njang, anggota masyarakat dari Pulau Pinang, individu tertekan oleh situasi dan harus memikirkan diri sendiri daripada orang lain sebab tidak ada cara lain untuk mencari penghasilan kecuali bergabung dengan perusahaan sawit. Lalu ada juga dilaporkan bahwa pencarian persetujuan kepada orang perorangan telah memperlemah ikatan sosial antar dan di dalam desa-desa.

Saat ini, masyarakat kelihatan terpecah daripada bersatu padu, walaupun ada kecenderungan 'bersatu kekuatan dalam protes' kelihatan,

seperti apabila satu desa menyampaikan ketidak-puasan memicu demonstrasi serupa di desa-desa lain. Pada saat bersamaan, tingkat kekecewaan di antara masyarakat semakin gamblang, merasa kurang mendapat perhatian dalam pembangunan sosial dan peluang ekonomi, seperti plasma dari perusahaan. Politik pemecah-belahan, dan masalahmasalah ikutannya soal siapa mewakili masyarakat, sangat jelas nyata dalam kesepakatan perorangan dan cenderung mengabaikan konsultasi dan pembahasan menyeluruh di tingkat desa mengenai persoalan plasma dan penetapan batas tanah.

Istilah 'masyarakat', dalam pandangan perusahaan, kelihatan semacam jumlah orang perorangan yang membuat kesepakatan perorangan dengan perusahaan, bukan sebagai kelompok orang-orang yang telah diajak bicara bersama mengenai masalah-masalah yang akan berdampak terhadap semua orang dalam kelompok, atau paling tidak antar dan di dalam hubungan sosial dan kepemilikan tanah. Masalah bagaimana orang perorangan dan masyarakat diwakilkan secara bertanggung gugat dan sah adalah pertanyaan penting, sebagaimana ditantang oleh beberapa keberatan atas keabsahan dan transparansi para kepala desa sekarang ini. Bisa dibuktikan bahwa sebuah masyarakat desa, dalam konteks FPIC sebagai hak kolektif bersama, seharusnya dipandang sebagai subjek tunggal, seorang 'manusia buatan' atau sebuah unit sosial-politik, sama seperti perusahaan sebagai sebuah entitas, yakni entitas hukum dan persona. Suatu masyarakat tidak hanya semata-mata kumpulan dari orangperorangannya tetapi suatu unit terpisah yang lebih dari sekedar

kumpulan dari anggota-anggotanya, dengan jati diri miliknya sendiri dan sistem sosial-budaya miliknya sendiri. Dalam hal ini, Negara memiliki peran sangat penting untuk dimainkan dalam menegaskan status masyarakat sebagai badan hukum (legal PT REA Kaltim Plantations - 202 - entity), tidak hanya semata-mata dalam hal administrasi pemerintahan tetapi juga sebagai suatu unit sosial-budaya, dengan hak-hak kolektif bersama, termasuk hak atas FPIC. Sementara langkah-langkah ditempuh oleh perusahaan dengan mengizinkan masyarakat mendapat keuntungan dari kehadiran perusahaan (seperti dalam bentuk kesepakatan plasma, PPMD, dan inisiatif pembangunan sosial) patut dipuji dan dihargai oleh masyarakat atas apa yang telah dipenuhi oleh perusahaan, beberapa temuan dari lapangan juga menyimpulkan bahwa hubungan antara perusahaan dan masyarakat sejak 1990an, hanya sebatas konsultasi dan negosiasi atas syarat-syarat hubungan mereka, bukan mengenai penghargaan untuk hak masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka. Oleh karena itu, sulit untuk menilai capaian-capaian positif oleh perusahaan apabila FPIC tidak dilakukan dengan baik sebagai syarat yang harus dijalankan terlebih dahulu. Meskipun begitu, penghargaan untuk hak atas FPIC adalah proses berulang tuntas, bukan merupakan suatu proses satu kali selesai, satu pengujian atas perkembangan hubungan antara perusahaan dan masyarakat lokal juga penting berkenaan dengan pembahasan seputar berbagai kendala yang masih dihadapi kemudian hari dalam hal syarat-syarat melindungi tanah masyarakat.

Kendala utama adalah kurangnya informasi yang tersedia untuk masyarakat lokal dari perusahaan melalui berbagai organisasi yang dibentuk untuk memenuhi tujuan ini. Sementara informasi dapat disampaikan melalui tim, dan kepada kepala desa, sangat sedikit sekali informasi disampaikan kepada masyarakat luas. Informasi mengenai RSPO, hak atas FPIC, status hukum kegiatan dan izin perusahaan, dan uraian lengkap pola kemitraan plasma (bagi anggota yang masih menunggu penyerahan plasma) tidak ada, dan hal ini mungkin yang menjadi alasan penting mengapa masih terjadi masalah dan benturan antar dan di dalam masyarakat. Kendala kedua adalah tidak ada pemetaan partisipatif atas tanah-tanah adat sejak tahun 1990an baik oleh perusahaan atau pemerintah. Batas-batas yang tidak jelas dimanfaatkan dan diklaim palsu oleh anggota masyarakat tertentu. Masyarakat dan perusahaan mengakui banyak masalah yang dapat dihindari apabila pemetaan tanah-tanah adat dilakukan bersama dengan masyarakat lokal tetapi perusahaan hingga saat ini tidak berencana melakukan pemetaan dengan beranggapan bahwa hal ini adalah tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab perusahaan. Di lain pihak, wawancara dengan utusan pemerintah menunjukkan bahwa peran serta anggota masyarakat dalam pemetaan tidak dipandang sesuai atau penting.

Kurangnya pemahaman dan pengakuan atas FPIC oleh wakil pemerintah yang diwawancarai, dan seringkali disamakan dengan sosialisasi (dipahami sebagai penyampaian keputusan dan maksud oleh pemerintah dan perusahaan kepada masyarakat dengan cara dialog satu

arah dari pada dua arah) semakin menghalangi pemenuhan hak atas FPIC bagi masyarakat. Ketiga, pembatasan disebabkan oleh perlakuan dan peluang tidak setara yang diberikan kepada sembilan desa di dalam konsesi perusahaan. Walaupun tidak bisa dipastikan apakah ini menyebabkan konflik antar-desa atau benturan karena isu sensitif dan singkatnya waktu berada di lapangan, masih bisa dibuktikan bahwa perbedaan perlakuan menyebabkan dampak jangka panjang, jika desa-desa yang mendapat peluang lebih sedikit menyadari tuntutan-tuntutan mereka tidak dipenuhi segera.

Terakhir, meskipun saat ini praktek konservasi perusahaan tidak mendatangkan masalah bagi masyarakat lokal, penetapan batas kategori HCV didalam areal yang ditemukan di lapangan dapat membantu menjadi cerminan dan memasukkan prioritas konservasi (termasuk nilai-nilai sosial dan budaya) oleh kelompok pemangku kepentingan dan membantu atau meningkatkan nilai-nilai tersebut. Dimensi sosial HCV, yaitu pentingnya nilai sosial bagi masyarakat, dapat tercermin dengan membuat batasan yang lebih jelas atas HCV4 (kawasan yang penting untuk menyediakan jasa ekosistem dasar dalam situasi kritis), HCV 5 (kawasan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal) dan HCV 6 (kawasan yang penting untuk identitas budaya tradisi masyarakat lokal). Rekomendasi dari Masyarakat Beberapa rekomendasi utama yang diungkapkan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan pola kemitraan plasma untuk masyarakat yang memiliki MoU dengan PT REA Kaltim Plantations di dalam kerangka waktu pelaksanaan yang jelas dan baik,
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh desa di dalam konsesi dalam hal peluang kemitraan, pembayaran ganti rugi dan insiatif pembangunan masyarakat,
3. Kompensasi atas lahan yang digarap di awal tahun 1990an termasuk ganti rugi tanam tumbuh pada saat itu, dan dalam beberapa kasus, nilai akumulasi atas lahan dan tanaman sejak pembebasan lahan oleh perusahaan,
4. Memperbaiki jalur komunikasi untuk berbagi informasi bagi perusahaan dan masyarakat untuk mulai diaktifkan secara rutin berkala dan tidak hanya pada saat ada masalah yang muncul,
5. Pelatihan hukum untuk masyarakat mengenai hak-hak mereka di bawah hukum nasional dan internasional,
6. Pelatihan difasilitasi oleh perusahaan mengenai standar RSPO dan hak atas FPIC,
7. Transparansi luas oleh perusahaan mengenai status hukum kegiatan perusahaan berjalan, rencana kegiatan dan perluasan kebun,
8. Pemetaan partisipatif atas tanah adat dan batas-batas konsesi/HGU agar memberi kejelasan mengenai siapa yang berhak atas kompensasi atas tanah yang digusur atau diambil perusahaan,

9. Perbaikan arus informasi yang tidak terbatas hanya diberikan kepada kepala desa dan tim tetapi juga disampaikan kepada anggota-anggota masyarakat secara memadai, benar dan tepat waktu,
10. Pengadaan dokumen-dokumen untuk anggota-anggota masyarakat khususnya terkait dengan pemetaan, HGU, kajian dampak sosial dan lingkungan, dan AMDAL,
11. Penyusunan peraturan daerah yang mengakui dan melindungi hak adat atas tanah,
12. Tindakan tegas oleh DPRD untuk menyelesaikan sengketa-sengketa lahan yang sedang terjadi didalam masyarakat melalui kerjasama dengan instansi pemerintah dan perusahaan. Rekomendasi dari Perusahaan Beberapa rekomendasi utama yang diungkapkan oleh perusahaan adalah:
 - a. PEMDA berperan sebagai jembatan dan fasilitator pihak ketiga bagi masyarakat dan PT Rea Kaltim Plantations dalam penyebar-luasan informasi, pemetaan dan resolusi konflik bersandar pada prinsip transparansi,
 - b. PEMDA bertindak sebagai pihak ketiga perantara bagi masyarakat lokal dan PT Rea Kaltim Plantations dalam menyelesaikan kompensasi lahan dan penyelesaian sengketa plasma berdasarkan prinsip transparansi,
 - c. LSM/NGO bekerjasama dengan PT Rea Kaltim Plantations dan masyarakat lokal untuk membantu proses berbagi komunikasi dan informasi dua-arah,

- d. Transparansi luas oleh pemerintah berkenaan dengan kebijakan, hukum dan peraturan baru terutama yang berkaitan dengan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam,
- e. Kolaborasi erat dengan badan-badan pemerintah dari tingkat desa sampai provinsi untuk memberi informasi kepada masyarakat setempat mengenai hak hukum dan HAM mereka serta berkaitan dengan pelaksanaan plasma,
- f. Upaya-upaya dari para kepala desa untuk menyampaikan informasi yang mereka terima dalam interaksi mereka dengan perusahaan kepada masyarakat luas agar menghindari kesalah-pahaman dan benturan di dalam masyarakat Rekomendasi kepada Lembaga Negara Satu rekomendasi disampaikan oleh wakil pemerintah BPN yang diwawancarai adalah usulan penyusunan peraturan di tingkat Kabupaten Kukar untuk menangani sengketa di luar sistem peradilan formal. Rancangan Peraturan Bupati Kukar Tentang Penyelesaian Sengketa Lahan Diluar Peradilan sedang disusun pada saat penulisan laporan ini.

2. Penyidik Dalam Menentukan Sebuah Model Yang Dipergunakan Untuk Menyelesaikan Konflik Massal Yang Beraspek Pidana Yang Terjadi Antara PT. Rea Kaltim Plantation Dengan Masyarakat Sekitar

Indonesia adalah negara kepulauan dengan aneka ragam suku bangsa dan budaya, juga memiliki keanekaragaman hukum adat. Keanekaragaman hukum tersebut pada akhirnya melahirkan perbedaan dari masing-masing daerah dalam hal penyelesaian konflik. Masing-masing daerah mempunyai mekanisme penyelesaian konflik sendiri-sendiri.

Kemajemukan masyarakat Indonesia, perbedaan yang ada, konflik yang mungkin dapat timbul, tidak selamanya dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menggunakan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menggunakan prinsip keseragaman, menganggap bahwa masyarakat yang satu sama dengan masyarakat yang lain. Dalam hal ini baik dari masyarakat maupun pihak-pihak yang bertikai tidak merasa ada kepuasan dari hukum nasional. Kenyataannya sesungguhnya bahwa hukum nasional belum tentu dapat menjamin keadilan yang diinginkan semua pihak, dan belum tentu bisa memulihkan kondisi masyarakat yang rusak akibat konflik tersebut.

Bagi masyarakat di tiap daerah yang masih berpegang pada aturan-aturan adat, penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat dirasakan lebih menjamin keadilan dan lebih memiliki kekuatan nilai dibandingkan hukum nasional yang cenderung kurang berpihak. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan kesepakatan bersama dari masyarakat setempat yang telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, individu maupun pihak yang bertikai.

Berlakunya hukum adat ini tidak hanya mencakup hukum privat, namun juga bisa menyentuh keberadaan hukum publik. Proses sistem peradilan pidana yang berjalan di daerah otonom dapat menggunakan pendekatan hukum adat dengan tetap mengacu pada hukum publik nasional. Hal itu berarti, berlakunya hukum adat tidak mengabaikan peran

komponen-komponen sistem peradilan pidana yang tetap memiliki fungsi sosial dan juga fungsi kontrol di masyarakat.

Otonomisasi yang berlaku sejak 1 Januari 2001, telah berdampak pada setiap bidang kehidupan masyarakat. Belakunya otonomi pada sebagian daerah di Indonesia agaknya telah memberi banyak harapan pada kehidupan masyarakat setempat. Dalam bidang ekonomi, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menjalankan aktivitas perekonomian serta melakukan eksplorasi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Dengan demikian bidang peradilan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat, kiranya dapat bersifat lebih fleksibel dalam menghadapi otonomisasi.

Upaya penyeragaman tentunya bukanlah jalan terbaik untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum nasional yang melahirkan tindakan anarkis pada sebagian masyarakat Indonesia. Krisis kepercayaan terhadap hukum nasional yang melanda Indonesia, pada kenyataannya juga disebabkan oleh adanya penyeragaman atau sentralistik aturan hukum dan pemonopolian aparat penegak hukum.

Terjadinya pengingkaran terhadap adanya perbedaan hukum dalam tiap komunitas masyarakat adat dan daerah yang diperkuat dengan

berbagai sikap dan tindakan penguasa pusat yang sering melecehkan nilai dan harga diri masyarakat adat, menjadikan krisis kepercayaan makin menguat dan menunjukkan wajah radikal di masyarakat adat dan daerah.

Aturan-aturan adat kerap memiliki sanksi (negatif) apabila aturan-aturan itu dilanggar, maka pelanggar akan menderita; penderitaan yang sesungguhnya bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula (sebelum pelanggaran itu terjadi atau dilakukan).³

Hal tersebut sesuai dengan ciri penghukuman yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer dalam bukunya "*The Limits of Criminal Sanction*", yaitu bahwa: Penghukuman harus menimbulkan rasa sakit yang tidak menyenangkan;

1. Penghukuman terjadi karena adanya pelanggaran hukum,
2. Adanya tindakan dari pelanggar atau tertuduh,
3. Tindakan penghukuman ditulis dengan sengaja oleh masyarakat, artinya telah di tulis dalam suatu kesepakatan khusus, dan
4. Penghukuman telah disahkan oleh pemerintah.

Dalam kaitannya dengan hukum adat, agaknya empat point teratas telah dipenuhi oleh hukum adat. Pada point kelima sebagai legalisasi penghukuman adat adalah menjadi tugas pemerintah pusat untuk mempertimbangkannya. Dan walaupun bidang peradilan masih dikuasai oleh pemerintah pusat, namun seharusnya tidak menutup kemungkinan penggunaan pendekatan adat dalam menyelesaikan masalah pidana di masyarakat. Hukum nasional (dalam hal ini KUHP) semestinya

³ Soerjono Soekanto, 1982, **Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia**, Kurnia Esa, Jakarta, hlm 10.

dapat bersifat elastis dan mau berhubungan dengan hukum adat. Hukum adat Indonesia pada dasarnya memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik masyarakat. Setiap masyarakat adat memiliki lembaga adat yang bertugas mengontrol perilaku individu di dalam masyarakat dan menjalankan hukuman jika terjadi pelanggaran akan hukum adat.

Contohnya pada kasus PT. Rea Kaltim Plantation dimana masyarakat melakukan tindak pidana terhadap perusahaan, sehingga terjadinya suatu perbuatan pidana yang mana dalam hal ini Polres Kutai Kartanegara harus melakukan suatu upaya hukum untuk melakukan suatu penyelesaian konflik agar tidak berujung pada masyarakat adat yang tidak diinginkan dan untuk menciptakan suatu keadilan bagi warga negara.

Penyelesaian adat dengan jalan mediasi maupun arbitrase. Arbitrase lebih banyak digunakan dalam penyelesaian kasus perdata. Sedangkan Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak dengan suasana keterbukaan, jujur dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah adalah proses di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.⁴

Penunjukan pihak ketiga sebagai mediator dapat terjadi karena :

⁴ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 69.

1. Kehendaknya sendiri (mencalonkan diri sendiri);
2. Ditunjuk oleh penguasa (misalnya tokoh adat);
3. Diminta oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian konflik dengan cara ini sesuai dengan prinsip *restorative justice*, dimana restorasi atau perbaikan merupakan jalan alternatif untuk menjembatani pelaku pelanggaran, korban serta masyarakat. Dalam prosesnya peradilan *restoratif* melibatkan dialog dan negosiasi. Dalam peradilan *restoratif*, tingkah laku kriminal masih dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi yang utama juga dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma masyarakat, di mana terdapat hubungan yang rusak antara pelaku, korban dan masyarakat.

Peradilan *restoratif* menjadi menarik, karena memandang kejahatan sebagai suatu hal yang dapat menimbulkan kerugian dan menyatakan bahwa keadilan seharusnya mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut, serta memulihkan hubungan antara semua pihak. Untuk mencapai hal itu, individu harus mau bertanggung jawab terhadap tingkahlakunya dan menerima pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Penggantian kerugian itu adalah dengan melibatkan partisipasi korban dan masyarakat, keduanya juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam peradilan *restoratif*. Pendekatan *restoratif* tepat pada waktunya akan memberikan campur tangan dalam pemulihan dan konsekuensi yang dapat memuaskan orang-orang, bahwa keadilan telah berkerja dengan baik dalam mengembalikan keseimbangan masyarakat yang diakibatkan oleh

kejahatan. Ada bermacam jenis dari pendekatan peradilan *restoratif* yang dapat digunakan di berbagai tingkat dalam proses sistem peradilan pidana, sebelum keputusan dibuat untuk mengabulkan tuntutan korban sampai pada saat seluruh proses pemberian hukuman kepada pelaku telah ditetapkan oleh hakim.

Polres Kutai Kartanegara sebagai jalur pertama dari Sistem peradilan pidana memegang peranan penting dalam proses mediasi tersebut. Dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya, polisi dapat menjadi fasilitator dari mediasi antara korban pelaku dan masyarakat. Sedangkan mediator ditunjuk dari kesepakatan antara polisi dan lembaga adat. Mediator dapat juga didatangkan dari pengadilan, sehingga pihak pengadilan juga terlibat dalam proses mediasi yang dilakukan di luar pengadilan tersebut.

Pada penerapannya jika hukum adat diberlakukan, maka nuansa Sistem Peradilan Pidana adalah sebuah nuansa yang bergerak antara *crime control model* dan *due process model*. Tingkah laku masyarakat yang cenderung lebih menghormati adat dapat menekan atau mengurangi perilaku jahat. Polisi sebagai komponen sistem peradilan pidana akan dapat melakukan efisiensi yang menekankan pada kecepatan dalam penyelesaian konflik, karena sebelum masuk dalam peradilan pidana, polisilah yang menjadi gerbang utama yang seharusnya dapat menyelesaikan konflik tersebut di luar jalur peradilan dengan melibatkan masyarakat, korban, pelaku serta lembaga adat.

Hal ini dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mengontrol kejahatan. memberlakukan hukum adat juga merefleksikan perlindungan terhadap hak-hak korban yang telah di atur oleh hukum adat. Namun di satu sisi hak tersangka juga tidak diabaikan, ini adalah justifikasi dari *due process model* di mana kekuasaan negara dibatasi guna menjamin hak-hak individu secara hukum. Dengan demikian sistem peradilan pidana dapat menjadi wakil masyarakat dan menjadi pelindung masyarakat.

Contohnya polisi dapat melakukan penangkapan kepada pelaku tindak pidana, namun tidak langsung membawanya ke pengadilan. Polisi berkerjasama dengan lembaga adat dapat meminta pihak pengadilan untuk menjadi mediator jika cara yang dipilih dalam penyelesaian adat itu adalah mediasi. Polisi mengawasi jalannya mediasi yang dilakukan antara pihak-pihak yang bertikai sehingga jika penyelesaian tersebut tidak membuahkan kesepakatan barulah polisi dapat melakukan tindakan yang diatur oleh hukum nasional yaitu dengan melakukan penyidikan dan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) untuk diserahkan ke kejaksaan dan pada akhirnya diproses sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.

Pendekatan hukum adat dalam rangka otonomi daerah dan hubungannya dengan sistem peradilan pidana. Pada saat polisi atau lembaga adat menerima pengaduan dari masyarakat, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah kompromisasi antara polisi dan lembaga adat. Kedua pranata sosial ini kemudian bekerja sama untuk mengadakan penyelidikan dengan melibatkan korban, pelaku dan

masyarakat. Setelah penyelidikan usai, maka polisi dan lembaga adat menyiapkan mediasi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berdasarkan kesepakatan bersama, mereka pun menunjuk seorang mediator untuk menjadi penengah dalam mediasi tersebut.

Mediator yang ditunjuk akan sangat baik jika berasal dari pihak pengadilan (hakim), karena jika mediasi tersebut gagal, maka hakim telah mempelajari kasus tersebut dan bisa bersikap obyektif dalam memutuskan perkara tersebut. Jika mediasi berhasil, maka akan tercapai suatu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, korban mendapatkan ganti rugi dan pelaku dapat kembali ke masyarakat. Sedangkan jika mediasi gagal, maka kasus tersebut harus melalui proses Sistem Peradilan Pidana yang sesuai dengan hukum pidana nasional. Yang perlu ditekankan adalah bahwa pendekatan hukum adat harus dibatasi pada kasus-kasus tertentu misalnya pencurian, atau kasus-kasus yang tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak terlalu menimbulkan amarah masyarakat.

Sedangkan untuk kasus yang menimbulkan korban jiwa seperti pembunuhan atau pengrusakan, *restorative justice* juga dapat diberlakukan. Namun demikian, perannya hanya sebatas memulihkan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat serta tidak menghapus sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Artinya penyelesaian dengan cara pendekatan adat untuk kasus pembunuhan atau perkosaan dapat dilakukan, namun pada dasarnya tidak memiliki tujuan untuk mengambil alih fungsi hukum pidana.

Pengadilan tetap diperlukan sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan hukuman formal, namun perihal kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku dikuasakan kepada korban. Sehingga baik korban atau pelaku akan mendapatkan keadilan. Peradilan *restoratif* pada pelaku tindak pidana berat diadakan untuk mengabulkan tuntutan korban sampai pada saat seluruh proses pemberian hukuman kepada pelaku telah ditetapkan oleh hakim.

Asas desentralisasi layak juga diberlakukan bagi sistem peradilan, walaupun tidak secara penuh menghidupkan kembali hukum adat tidak serta merta menghilangkan peran Sistem Peradilan Pidana sebagai institusi legal yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Hukum adat harus tetap mengacu pada hukum nasional. Untuk bisa berlaku hukum adat juga mempunyai syarat-syarat, yaitu:

1. Profesionalisme, di mana profesionalisme komponen sistem peradilan pidana harus tinggi. Jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan harus yakin dengan kemampuan polisi dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan hukum adat.
2. Adanya pendekatan sistemik, di mana pihak-pihak yang bertikai, mediator, serta masyarakat yang melakukan perundingan sudah tahu perannya masing-masing dan berusaha mencapai tujuan yang sama.
3. Adanya efisiensi (*Speedy Trial*). Jika profesionalisme dan pendekatan sistemik dapat diwujudkan, maka akan tercipta efisiensi. Pendekatan hukum adat ini memang cenderung lebih berorientasi pada efisiensi

kerja komponen sistem peradilan pidana (khususnya kepolisian) dari pada pencapaian hasil yang akurat.

Jadi fungsi sistem peradilan pidana dalam penyelesaian sengketa disini sangat berpengaruh dalam penyelesaian sengketa. disini fungsi sistem peradilan pidana menjadi fasilitator dalam mediasi yang dilakukan oleh korban, pelaku dan masyarakat. Keterlibatan lembaga adat dalam penyelesaian konflik ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam penyelesaian konflik. Juga untuk pemenuhan hak-hak korban menjadi landasan utama dari sistem.

Proses Sistem Peradilan Pidana yang berjalan di daerah otonom dapat menggunakan pendekatan hukum adat dengan tetap mengacu pada hukum publik nasional. Hal itu tidak mengabaikan peran komponen-komponen sistem peradilan pidana tetap mempunyai fungsi sebagai fungsi sosial dan fungsi kontrol dalam masyarakat.

BAB IV PENUTUP

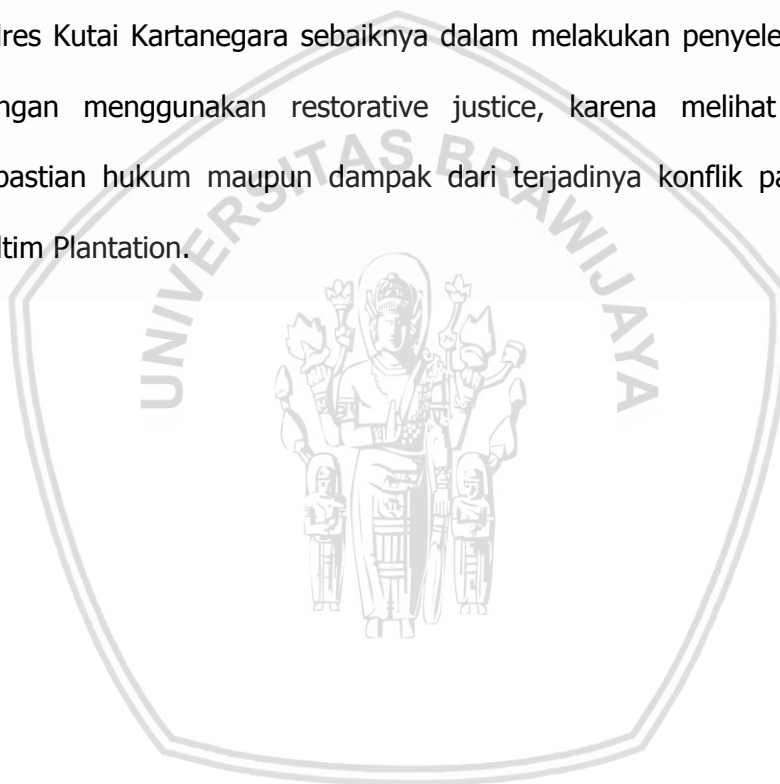
A. Kesimpulan

1. Tidak adanya pengakuan terhadap hak adat atas tanah dalam hukum ditunjukkan oleh beberapa anggota masyarakat sebagai akar penyebab disintegrasi sistem kepemilikan tanah bersama/komunal yang secara tradisi dijalankan, dan pemberian izin konsesi kepada perusahaan sektor swasta (kayu dan kelapa sawit) tanpa konsultasi dengan masyarakat, atau persetujuan dari masyarakat yang telah memiliki, mendiami dan menggunakan tanah-tanah tersebut untuk sumber penghidupan mereka. Hal inilah yang menjadi penyebab timbulnya konflik yang terjadi di wilayah Polres Kutai Kartanegara.
2. Hukum adat dapat menjadi hukum positif pada daerah otonom dengan syarat pelaksanaannya harus tetap mengacu pada hukum nasional. Pemberlakuan hukum adat ini tidak serta merta menghilangkan fungsi komponen sistem peradilan pidana. Peran komponen sistem peradilan pidana yang terbesar adalah dari pihak kepolisian. Polisi sebagai jalur pertama dari sistem peradilan pidana, dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya dapat melakukan kerjasama dengan lembaga adat. Dalam penyelesaian sengketa dalam hukum adat, sistem peradilan pidana juga ikut andil di dalamnya, dalam contoh Polisi juga yang menjadi fasilitator dalam mediasi yang dilakukan oleh korban, pelaku dan masyarakat. Apabila jalur mediasi yang dilakukan gagal, maka kasus tersebut akan diambil alih oleh hukum pidana nasional selanjutnya diproses sesuai dengan dengan hukum

pidana tersebut. Sehingga fungsi sistem peradilan pidana adalah sebagai fungsi sosial dan fungsi kontrol di masyarakat.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara dapat memberikan jalan keluar dengan membuat Peraturan Daerah terkait dengan tanah adat agar dapat mencegah terjadinya konflik masyarakat adat.
2. Polres Kutai Kartanegara sebaiknya dalam melakukan penyelesaian konflik dengan menggunakan restorative justice, karena melihat hal terkait kepastian hukum maupun dampak dari terjadinya konflik pada PT. Rea Kaltim Plantation.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdulkadir Muhammad, 2004, ***Hukum dan Penelitian Hukum***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amir Ilyas, 2012, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Agung Fakhruzy, 2013, ***Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana yang berkaitan dengan KDRT yang dilakukan suami terhadap istri (study di POLRES Pamekaran)***, Tesis, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Anthony Giddens, 1998, ***The Third Way : Jalan Ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial***, Gramedia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif , 1994, ***Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara***, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 1996, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, Citra Aditya, Bandung.
- Barda Nawawi Arif, 2002, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Namawi Arief, 2007, ***Mediasi Penal; Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*** Penerbit Program Magister Pasca Sarjana Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2011, ***Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)***, Kencana, Jakarta.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, ***Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"***, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- DJazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009, ***Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia***, Alumni, Malang.
- Galenter Marc, 1998, ***Justice In Many Rooms: Court, Private Ordering, And indigenous Law***. Journal of Legal Pluralisme.
- George Ritzer dan Douglas J. Gooman, 2004, ***Teori Sosiologi Modern***, Prenada Media, Jakarta.

- Hadimulya, 1977, ***Mempertimbangkan ADR Kajari Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan***, Lembaga studi dan advokasi masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, ***Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum***, Mandar Maju, Bandung.
- Iskandar, 2009, ***Metodologi Penelitian Kualitatif, Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi, Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat***, Gaung Persada, Jakarta.
- Jimly Ashiddiqie, 1994, ***Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia***, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2009, ***Menuju Negara Hukum yang Demokrasi***, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- John Rawls, 2010, ***Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara***, Yogyakarta: terjemahan Uzair Fauan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar.
- Joni Emirzon, 2001, ***Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase)***, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1998, ***Pemimpin dan Kepemimpinan***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, ***Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)***, Kanisius, Jakarta.
- Media Handayani, 2003, ***Aku Membeli, Maka Aku Ada; Kritik Terhadap Konsumenrisme Menurut Pandangan Baudrillard dan Marcuse***, Majalah Respon, Volume 8 Nomor 01.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, ***Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia***, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta.
- Moh Nazir, 2009, ***Metode Penelitian***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Farouk dan H. Djaali, 2005, ***Metodologi Penelitian Sosial***, Restu Agung, Jakarta.
- Muhammad, Farouk. Dkk, 2008, ***Metodologi Penelitian: Modul A2536/2SKS***, PTIK, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, ***Teori-teori dan Kebijakan Pidana***, Alumni, Bandung.

- Nader and todd, 1978, ***The Disputing Process-law in Ten Societies***, Colombia Univercity Press, Newyork.
- Ninik Suparni, 1992, ***Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup***, Sinar Galia, Jakarta.
- Novri Susan, 2009, ***Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer***, Kencana, Jakarta.
- P.A.F., Lamintang, 2011, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat***, PT.Citra Aditya Bakti.
- Rachmad safa'at, 2011, ***Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Latar Belakang, Konsep, dan Implementasi***, Surya Pena Gemilang Malang.
- Raco, J.R, 2010, ***Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya***, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S.F. Marbun, 1997, ***Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman***, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol. 4.
- Soerjono Soekanto, 1982, ***Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia***, Kurnia Esa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1992, ***Sosiologi Suatu Pengantar***, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, ***Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)***, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1981, ***Hukum dan Hukum Pidana***, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1983, ***Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat***, Sinar Baru, Bandung.
- Sudarsono, 2007, ***Kamus Hukum, Cetakan Kelima***, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Sultan Zanti Arbi, Dan Wayan Ardana , 1997, ***Rancangan Penelitian dan kebijakan sosial***, CV.Rajawali, Jakarta.
- Syahrul Machmud, 2012, ***Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia***, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2011, ***Hukum Pidana Cetakan Kedua***, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Thomas Santosa, 2012, ***Teori-teori Kekerasan***, Liberty Press Yogyakarta, Yogyakarta.

Usep Ranawijaya, 1983, ***Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya***, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Utrecht, 1962, ***Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia***, Ihtiar, Jakarta.

Wahyu, 1986, ***Wawasan Ilmu Sosial Dasar***, Usaha Nasional, Surabaya.

W. Riawan Tjandra, 2014, ***Hukum Sarana Pemerintahan***, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.

Zainal Abidin Farid, 2007, ***Hukum Pidana I***, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.